



Katalog BPS: 8299003

KAJIAN KONSUMSI BAHAN POKOK 2017



BADAN PUSAT STATISTIK

KAJIAN KONSUMSI BAHAN POKOK 2017



Kajian Konsumsi Bahan Pokok Tahun 2017

ISBN : 978-602-438-277-3

No. Publikasi : 06330.1904

Katalog : 3201034

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman : vi + 84 halaman

Naskah :

Subdirektorat Statistik Pariwisata

Penyunting :

Subdirektorat Statistik Pariwisata

Desain Kover oleh :

Subdirektorat Statistik Pariwisata

Penerbit :

© BPS RI

Pencetak :

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Pertumbuhan ekonomi, penambahan jumlah penduduk, serta tingkat pendapatan rumah tangga akan berpengaruh terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan ketahanan pangan karena pangan merupakan salah satu sumber energi yang harus dipenuhi bagi kelangsungan hidup manusia. Ketahanan pangan di Indonesia sering dikaitkan dengan ketersediaan bahan pokok terutama komoditas beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Ketersediaan bahan pokok terutama komoditas beras mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Data/informasi tentang konsumsi/penggunaan bahan pokok yang akurat sangat diperlukan dalam mendukung pengambilan kebijakan di bidang ketahanan pangan oleh pemerintah, khususnya komoditas beras, baik untuk kebutuhan pangan maupun non pangan.

Ketersediaan informasi yang akurat mengenai besaran konsumsi/penggunaan bahan pokok di Indonesia, terutama di tingkat provinsi belum tersedia secara baik. Beberapa pendekatan penghitungan konsumsi/penggunaan bahan pokok yang dilakukan dari berbagai sumber menunjukkan adanya informasi yang sangat beragam. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai salah satu sumber informasi konsumsi bahan pokok selama ini secara akurat hanya mampu memotret konsumsi bahan pokok yang diolah di dalam rumah tangga, sementara konsumsi bahan pokok dalam bentuk makanan jadi (diolah di luar rumah tangga) belum sepenuhnya dapat dihitung secara akurat, khususnya di tingkat provinsi.

Berdasarkan hasil kajian konsumsi bahan pokok tahun 2015 masih dipandang perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut, mengingat kajian tersebut cakupan komoditinya masih terbatas dengan tingkat akurasi masih kurang optimal. Oleh karena itu, Survei Konsumsi Bahan Pokok yang dilakukan pada tahun 2017 diharapkan dapat menampilkan angka konsumsi beberapa komoditi bahan pokok yang utama dan ditambah dengan beberapa komoditi lain yang belum pernah dicakup sebelumnya. Bahan pokok yang dicakup dalam kegiatan ini meliputi beras, jagung, kedelai, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam/bebek, susu sapi segar, ikan segar, bawang merah, dan cabai.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam kajian ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga hasil kajian ini bermanfaat, khususnya bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pangan nasional, serta pihak lain yang berkepentingan dengan masalah bahan pokok.

Jakarta, 31 Mei 2018

Direktur Statistik Keuangan,
Teknologi Informasi, dan Pariwisata



Dr. Titi Kanti Lestari SE, M.Com.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	3
1.2. Tujuan	5
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Keterbatasan Kajian	5
BAB 2 METODOLOGI	7
2.1. Konsep Definisi	9
2.2. Jenis dan Sumber Daya	17
2.3. Kerangka Analisis Penghitungan Perkiraan Konsumsi Bahan Pokok	18
2.4. Metode Analisis	19
2.5. Metode Perkiraan Konsumsi Bahan Makanan	19
2.6. Metode Perkiraan Konversi Bahan Pokok	21
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1. Konsumsi Beras	27
3.2. Konsumsi/Penggunaan Jagung	32
3.3. Konsumsi/Penggunaan Kedelai	35
3.4. Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau	38
3.5. Konsumsi Daging Ayam	41
3.6. Konsumsi Telur Ayam Ras dan Telur Bebek/Itik	43
3.7. Konsumsi Susu Sapi Segar	46
3.8. Konsumsi Ikan Segar	48
3.9. Konsumsi Bawang Merah	51
3.10. Konsumsi Cabai	54
BAB 4 KESIMPULAN	57
LAMPIRAN	63

1

PENDAHULUAN

<https://www.dns.go.id>

1.1 Latar Belakang

RPJMN 2015-2019 merupakan RPJMN Fase III dalam siklus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan fokus pada peningkatan keunggulan sumber daya manusia, sumber daya alam serta daya saing yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. RPJMN Bidang Pangan dan Pertanian 2015-2019 telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019. Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang salah satu kontribusinya digambarkan dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyedia bahan pakan serta bioenergi. Sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta mencanangkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, upaya penting yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, yang diarahkan untuk menopang kekuatan ekonomi domestik.

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Ketahanan pangan nasional masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat, ketahanan pangan

yang dibangun di Indonesia harus memenuhi kriteria cukup secara berkelanjutan bagi seluruh penduduk, terutama dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman dan terjangkau dari waktu ke waktu. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya sesuai permintaan dari waktu ke waktu.

Konsumsi pangan merupakan jumlah pangan, secara tunggal atau beragam, yang dikonsumsi seseorang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, maupun sosiologisnya. Pemenuhan konsumsi pangan diprioritaskan pada konsumsi pangan bahan pokok khususnya bahan pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam/bebek/itik, susu sapi, ikan, bawang merah, dan cabe. Bahan pokok tersebut merupakan faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat seperti kalori, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

Tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi bahan pokok, menyebabkan bahan pokok tersebut memiliki nilai strategis baik secara politik maupun ekonomi. Pada tahun 2011 Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan kajian khusus mengenai konsumsi beras dengan berbagai pendekatan yang didasarkan pada berbagai sumber data, yaitu Susenas, Survei Industri, Survei Konsumsi dan Cadangan Beras Nasional, serta Tabel Input Output. Kemudian pada tahun 2012 BPS melakukan Survei Konsumsi Beras Nasional untuk melengkapi data yang masih belum tersedia untuk penghitungan konsumsi beras pada tahun 2011.

Berdasarkan hasil kajian tersebut dan berbagai perkembangan beberapa tahun terakhir yang ditandai gejolak beberapa harga bahan pokok, seperti cabe merah dan daging sapi, maka telah dilakukan kajian lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih luas dan tidak hanya beras. Hal ini dikarenakan tingkat ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh beras, tetapi juga komoditas lain, seperti cabe, bawang merah, dan daging sapi. Untuk itu, pada tahun 2014 dan 2015 dilakukan Survei Konsumsi Bahan Pokok yang hasilnya akan digunakan untuk memperkirakan jumlah konsumsi beberapa komoditas bahan pokok pada tingkat nasional untuk usaha-usaha yang diperkirakan menggunakan bahan pokok tersebut sebagai bahan baku. Pada tahun 2017 dilakukan kembali survei yang sama dengan cakupan yang lebih luas dan beberapa komoditas diganti. Disamping itu, tingkat penyajiannya dari level nasional hingga level provinsi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kajian Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017 ini adalah untuk mendapatkan angka perkiraan konsumsi/penggunaan bahan pokok meliputi beras, jagung, kedelai, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam/bebek/itik, ikan, bawang merah, dan cabe di tingkat provinsi, serta estimasi di tingkat nasional untuk kesepuluh bahan pokok tersebut.

1.3 Ruang Lingkup

Kajian konsumsi bahan pokok 2017 ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi per kapita beras, jagung, kedelai, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam/bebek/itik, ikan, bawang merah, dan cabe di tingkat provinsi, serta estimasi kesepuluh bahan pokok tersebut di tingkat nasional. Penghitungan dilakukan dengan cara menggabungkan konsumsi bahan pokok yang diolah di dalam rumah tangga hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2017 dengan konsumsi bahan pokok di luar rumah tangga dari hasil Survei Konsumsi Bahan Pokok 2017 yang meliputi konsumsi bahan pokok di industri pengolahan (baik industri menengah besar maupun industri mikro kecil), jasa akomodasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, dan jasa kesehatan. Kegiatan Survei Konsumsi Bahan Pokok 2015 dilakukan di seluruh provinsi yang mencakup 260 kabupaten/kota, 6.016 blok sensus, dan 30.000 usaha.

1.4 Keterbatasan Kajian

Beberapa keterbatasan hasil kajian konsumsi bahan pokok yang perlu disebutkan terkait dengan sumber data untuk penghitungan konsumsi bahan pokok, antara lain:

1. Meskipun Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencakup seluruh wilayah Indonesia dan dapat digunakan untuk mengestimasi sampai dengan level provinsi, terjadinya *underestimate* tentang konsumsi bahan pokok khususnya yang diolah di dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi, mengingat cara pengumpulan data Susenas yang dilakukan tidak dengan metode pencatatan harian tetapi dengan mengingat konsumsi selama seminggu yang lalu (*recall*).
- 2 Pendekatan *establishment* untuk menghitung penggunaan/konsumsi bahan pokok di luar rumah tangga beresiko tidak tercatatnya konsumsi makanan jadi yang berasal dari rumah tangga lain (bukan establishment), karena makanan jadi yang berasal dari rumah tangga lain hanya tercatat di Susenas, sementara kajian ini tidak menghitung konsumsi bahan pokok pada makanan jadi hasil Susenas.

- 3 Informasi tentang konsumsi per kapita merupakan gambaran kebutuhan/permintaan, dan tidak selalu mencerminkan volume bahan pokok yang dikonsumsi manusia. Hal ini mengingat subyek pendataan juga termasuk industri yang mengolah bahan pokok untuk pakan ternak, farmasi, dan kosmetik.
- 4 Informasi konsumsi bahan pokok juga belum mencakup informasi tentang penggunaan bahan pokok seperti jagung yang langsung digunakan oleh para peternak.
- 5 Interpretasi hasil konsumsi bahan pokok perkapita yang disajikan di masing-masing provinsi tidak selalu mencerminkan besaran konsumsi bahan pokok penduduk provinsi yang bersangkutan. Mengingat cakupan responden antara lain adalah usaha jasa akomodasi dan usaha penyediaan makan minum, maka besaran konsumsi bahan pokok perkapita di provinsi “lebih” mencerminkan “kebutuhan ketersediaan” bahan pokok di provinsi yang bersangkutan.

<https://www.bps.go.id>

2

METODOLOGI

<https://www.ms.go.id>

2.1 Konsep Definisi

Pada Kajian Konsumsi Bahan Pokok 2017 ini terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait. Penjelasan dari konsep dan definisi tersebut di antaranya sebagai berikut:

Rumah Tangga dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Rumah Tangga Biasa (*Ordinary Household*)

Rumah Tangga Biasa (*Ordinary Household*) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Contoh rumah tangga biasa, di antaranya: orang yang tinggal bersama istri dan anaknya; orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makannya sendiri; pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anggota rumah tangga lain yang makan dari satu dapur terpisah dari lembaga yang diurusnya; masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri-sendiri.

b. Rumah Tangga Khusus (*Special Household*)

Rumah Tangga Khusus (*Special Household*) adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga serta sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih.

Kajian konsumsibahan pokokini hanya merujuk pada konsumsi bahan pokok pada rumahtangga biasa seperti yang dikumpulkan melalui Susenas, akan tetapi anggota rumah tangga pada rumah tangga khusus diperhitungkan dalam penimbang, sehingga pada kajian ini seluruh penduduk baik yang hidup di rumah tangga biasa maupun rumah tangga khusus dicakup dalam angka perkiraan konsumsi.

Konsumsi

Konsumsi bahan pokok dalam kajian ini mencakup bahan pokok yang digunakan untuk konsumsilangsung oleh manusia maupunkonsumsiatau penggunaan yang dilakukan untuk selain manusia, misalnya untuk bahan baku industri pengolahan. Penghitungan konsumsi bahan pokok di rumah tangga mengacu pada konsep yang digunakan oleh Susenas. Dalam konsep Susenas, yang

dimaksud dengan konsumsi adalah makanan atau bahan makanan yang benar-benar dikonsumsi oleh anggota rumah tangga. Sebagai contoh, konsumsi beras untuk keperluan pesta tidak dicatat pada rumah tangga yang mengadakan pesta tetapi dicatat sebagai konsumsi makanan jadi pada rumah tangga yang datang ke pesta dan mengkonsumsinya. Konsumsi pada Susenas tidak mencakup komoditas yang sudah dimasak atau diolah namun tidak dikonsumsi oleh anggota rumah tangga tersebut karena basi atau terbuang. Sementara itu, konsep konsumsi atau penggunaan pada Industri pengolahan dan usaha penyedia makanan dan minuman merujuk pada input/penggunaan komoditas untuk sektor tersebut.

Bahan Pangan Pokok

Bahan pangan pokok yang dihitung konsumsinya pada kajian ini terdiri dari;

- a. **Beras**, meliputi beras dan beras ketan. Dalam penyajian penghitungan disetarakan ke bentuk **beras**.
- b. **Jagung**, meliputi jagung basah dengan kulit/tanpa kulit, jagung kering tanpa kulit, jagung pipilan (basah/kering), beras jagung, dan tepung jagung/maizena. Dalam penyajian penghitungan disetarakan ke bentuk **jagung pipilan kering**.
- c. **Kedelai**, meliputi kacang kedelai lokal dan kacang kedelai impor, baik dalam bentuk biji kering maupun kacang kedelai basah (ada batang dan daun basah). Dalam penyajian penghitungan disetarakan ke bentuk **kedelai biji kering**.
- d. **Daging sapi dan daging kerbau**, meliputi daging sapi dan daging kerbau segar, daging sapi dan daging kerbau beku, tetelan sapi dan kerbau, dan daging dengan tulang iga. Dalam penyajian penghitungan disetarakan ke bentuk **daging segar**.
- e. **Daging ayam**, meliputi daging ayam ras (ayam potong), daging ayam buras (ayam kampung), tetapi tidak termasuk jeroan.
- f. **Telur ayam ras dan telur bebek/itik**, meliputi telur ayam ras dan telur bebek atau itik, tetapi tidak termasuk telur ayam buras (telur ayam kampung).
- g. **Susu sapi segar**, yaitu cairan yang berasal dari susu sapi sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambahkan sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan.
- h. **Ikan segar dan hewan air lainnya**, meliputi ikan tuna/tongkol/cakalang, ikan kembung, ikan bandeng, ikan lainnya, dan hewan air selain ikan, tetapi tidak termasuk rumput laut.
- i. **Bawang merah**, meliputi bawang merah lokal dan bawang merah impor, baik bawang merah kering konsumsi (utuh), bawang merah giling, maupun bawang merah goreng. Tidak termasuk bawang daun

dan bawang bombay. Dalam penyajian penghitungan disetarakan ke bentuk **bawang merah utuh/segar**.

- j. **Cabe**, meliputi jenis cabe besar (cabe merah, cabe ijo, dan cabe keriting) maupun cabe rawit, tidak termasuk paprika. Cabe menurut bentuk meliputi cabe kering, cabe giling, dan cabe bubuk. Dalam penyajian penghitungan disetarakan ke bentuk **cabe utuh/segar**.

Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek

Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek adalah penyediaan akomodasi, khususnya untuk harian atau mingguan, pada prinsipnya untuk tinggal dalam jangka pendek sebagai pengunjung. Termasuk penyediaan akomodasi dengan furnitur, lengkap dengan dapur, dengan atau tanpa jasa pramuwisma dan sering kali termasuk beberapa tambahan jasa dan fasilitas seperti fasilitas parkir, binatu, kolam renang, ruang olahraga, fasilitas rekreasi dan ruang rapat. Termasuk juga akomodasi yang disediakan oleh berbagai macam hotel, penginapan, losmen, hostel, villa dan lain-lain. (KBLI 2015). **Dalam kajian ini, yang dicakup hanya perusahaan/usaha hotel berbintang.**

Hotel

Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. Hotel bintang meliputi hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, dan hotel bintang satu.

Restoran/Rumah Makan

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perengkapan untuk proses pembuatandan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya. (KBLI 2015).

Jasa Boga/Catering

Kelompok ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu even tertentu. Kelompok ini mencakup usaha penjualan makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan untuk kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan jadi yang dipesan diantar ke tempat

kerja, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta/seminar berlangsung. (KBLI 2015).

Warung Makan

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat usahanya baik dilengkapi maupun tidak dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan maupun penyimpanan dan **belum mendapatkan ijin dan surat keputusan** dari instansi yang membinanya. (KBLI 2015).

Kedai Makan

Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai *seafood*, pecel ayam dan lain-lain. (KBLI 2015).

Kedai Minum

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya. (KBLI 2015).

Kafe/Rumah Minum

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum. (KBLI 2015).

Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak tetap

Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling,

seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain. (KBLI 2015).

Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak tetap

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong dan lain-lain. (KBLI 2015).

Industri Manufaktur

Industri Manufaktur merupakan kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. **Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur** adalah unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur, terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Industri manufaktur yang dicakup dalam kajian ini adalah industri dengan KBLI 2 digit, meliputi digit:

10 = Industri makanan

11 = Industri minuman

20 = Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia

21 = Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional

Tidak termasuk industri tepung beras, tepung ketan, industri tepung jagung, industri maizena (pati jagung), dan industri pembekuan daging, industri penggilingan (penyosohan beras), dan rumah potong hewan.

BPS mengklasifikasikan perusahaan/usaha industri manufaktur di Indonesia ke dalam 4 (empat) skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja/pekerja pada suatu perusahaan/usaha. Skala usaha tersebut adalah seperti berikut:

Industri Besar : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih.

Industri Sedang : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 20-99 orang.

Industri Kecil : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 5-19 orang.

Industri Mikro : perusahaan/usaha industri manufaktur yang mempunyai pekerja 1-4 orang.

Kegiatan industri manufaktur yang dicakup dalam kajian ini mengacu pada **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 5-digit tahun 2015**. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI 2015 menggunakan kode angka 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi. Kode KBLI 5-digit untuk industri manufaktur yang kemungkinan menggunakan bahan pokok sebagai bahan baku usahanya antara lain:

KBLI 5-digit yang menjadi cakupan dalam kegiatan ini

No.	KBLI 5 Digit	Bahan Baku yang mungkin digunakan	Produk yang dihasilkan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	10130	Daging sapi, kerbau, dan ayam	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
2.	10211	Ikan dan biota air lainnya	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
3.	10212	Ikan dan biota air lainnya	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
4.	10213	Ikan dan biota air lainnya	Industri Pembekuan Ikan
5.	10214	Ikan dan biota air lainnya	Industri Pemandangan Ikan
6.	10215	Ikan dan biota air lainnya	Industri Peragian/Fermentasi Ikan
7.	10216	Ikan dan biota air lainnya, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, bawang merah	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
8.	10217	Ikan dan biota air lainnya	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan
9.	10219	Ikan dan biota air lainnya	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
10.	10221	Ikan dan biota air lainnya	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
11.	10222	Ikan dan biota air lainnya	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
12.	10291	Ikan dan biota air lainnya	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
13.	10293	Ikan dan biota air lainnya	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya

No.	KBLI 5 Digit	Bahan Baku yang mungkin digunakan	Produk yang dihasilkan
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	10299	Ikan dan biota air lainnya	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
15.	10311	Cabe merah, cabe rawit	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran
16.	10312	Cabe merah, cabe rawit	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran
17.	10313	Cabe merah, cabe rawit	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran
18.	10391	Jagung, kedelai	Industri Tempe Kedelai
19.	10392	Kedelai	Industri Tahu Kedelai
20.	10411	Jagung, Kedelai	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati
21.	10414	Ikan dan biota air lainnya	Industri Minyak Ikan
22.	10490	Jagung dan kedelai	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
23.	10510	Susu	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
24.	10520	Susu	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
25.	10531	Susu	Industri Pengolahan Es Krim
26.	10532	Susu	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan balok)
27.	10590	Susu	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
28.	10614	Jagung dan kedelai	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
29.	10615	Kedelai	Industri Makanan Sereal
30.	10633	Beras dan Jagung	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
31.	10710	Jagung	Industri Produk Roti dan Kue
32.	10732	Susu	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula
33.	10740	Beras	Industri Makaroni, mihun, dan produk sejenisnya
34.	10750	Bahan Pokok	Industri Makanan dan Masakan Olahan
35.	10761	Susu	Industri Pengolahan Kopi
36.	10763	Susu	Industri Pengolahan Teh
37.	10771	Kedelai	Industri Kecap
38.	10772	Daging sapi, daging kerbau, daging ayam, cabe merah, cabe rawit, dan bawang merah	Industri Bumbu masak dan Penyedap masakan
39.	10779	Beras, daging sapi, daging kerbau, dan daging ayam	Industri Produk Masak Lainnya
40.	10792	Bahan pokok	Industri Kue basah

No.	KBLI 5 Digit	Bahan Baku yang mungkin digunakan	Produk yang dihasilkan
(1)	(2)	(3)	(4)
41.	10793	Cabe merah, cabe rawit, dan bawang merah	Industri Makanan dari kedele dan kacang bukan kecap, tempe dan tahu
42.	10794	Beras, cabe merah, cabe rawit, dan bawang merah	Industri Kerupuk, peyek, dan sejenisnya
43.	10795	Susu	Industri Krimer Nabati
44.	10799	Beras, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, susu, cabe merah, rawit, dan bawang merah	Industri Produk makanan lainnya
45.	10801	Beras	Industri Ransum makanan hewan
46.	10802	Beras, jagung	Industri Konsentrat Makanan Hewan
47.	11010	Susu	Industri Minuman Keras
48.	11020	Susu	Industri Minuman anggur (sake)
49.	11040	Susu	Industri Minuman Ringan
50.	11090	Susu	Industri Minuman lainnya
51.	20232	Beras, susu	Industri Bahan kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
52.	21011	Beras, susu	Industri Bahan Farmasi
53.	21012	Beras, susu	Industri Produk Farmasi
54.	21022	Beras, susu	Industri Produk obat tradisional

Jasa Kesehatan

Jasa Kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin, rumah bersalin, dan puskesmas yang menyediakan tempat menginap. **Namun dalam kajian ini yang dicakup hanya rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin, dan rumah bersalin.**

Rumah Sakit (RS) adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit mencakup rumah sakit umum dan khusus. Rumah sakit umum bisa dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI atau swasta/BUMN. RS Pemerintah Pusat misalnya RSCM/RSUP Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta, RS Pemerintah Daerah misalnya RS Abdul Muluk di Lampung, RS Bhayangkara milik POLRI dan RS Swasta misalnya RS Stella Maris di Kota Makasar-Sulawesi Selatan, RS Pelni/RS Pertamina milik

BUMN. Sedangkan rumah sakit khusus contohnya adalah rumah sakit perawatan paru-paru dan rumah sakit jantung.

Rumah Sakit Bersalin adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan.

Rumah Bersalin adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior.

Jasa Lainnya

Jasa Lainnya yang mengkonsumsi bahan pokok adalah jasa hiburan, lembaga pemasyarakatan (LP), panti asuhan, panti jompo atau panti-panti lainnya. Kegiatan LP hanya oleh pemerintah, tetapi panti-panti dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. **Namun dalam Kajian Konsumsi Bahan Pokok Tahun 2017, jasa lainnya tidak dicakup.**

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data konsumsi bahan pokok baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga seperti industri, hotel, restoran/rumah makan, catering, warung makan dan penyedia makanan dan minuman lainnya, dan jasa kesehatan. Sumber data yang digunakan dalam memperkirakan konsumsi bahan pokok di dalam rumah tangga diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2017, sedangkan untuk memperkirakan konsumsi bahan pokok di luar rumah tangga diperoleh dari Survei Konsumsi Bahan Pokok 2017. Kedua sumber data tersebut diharapkan mampu mencakup semua konsumsi bahan pokok, baik yang diolah di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Berikut penjelasan ringkas dari kedua sumber data tersebut;

2.2.1 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional digunakan untuk memperkirakan konsumsi bahan pokok di dalam rumah tangga dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Susenas menyajikan konsumsi makanan dan bukan makanan. Mulai tahun 2015 hingga saat ini, kegiatan Susenas dilakukan setiap tahun pada bulan Maret di seluruh provinsi di Indonesia pada 511 kabupaten/kota dengan jumlah sampel sebanyak 300.000 rumah tangga pada 30.000 blok sensus. Data yang digunakan pada publikasi ini adalah hasil pendataan Susenas bulan Maret tahun 2017.

2.2.2 Survei Konsumsi Bahan Pokok 2017

Survei Konsumsi Bahan Pokok dimaksudkan untuk memperkirakan konsumsi beras, jagung, kedelai, daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur ayam ras dan telur bebek, susu sapi segar, ikan dan biota air lainnya, bawang merah, dan cabai yang diolah di luar rumah, khususnya yang terkait dengan penyediaan makanan di luar rumah tangga. Survei ini meliputi kategori penyediaan bahan pokok di industri pengolahan, akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, dan jasa kesehatan yang dilaksanakan di 364 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.

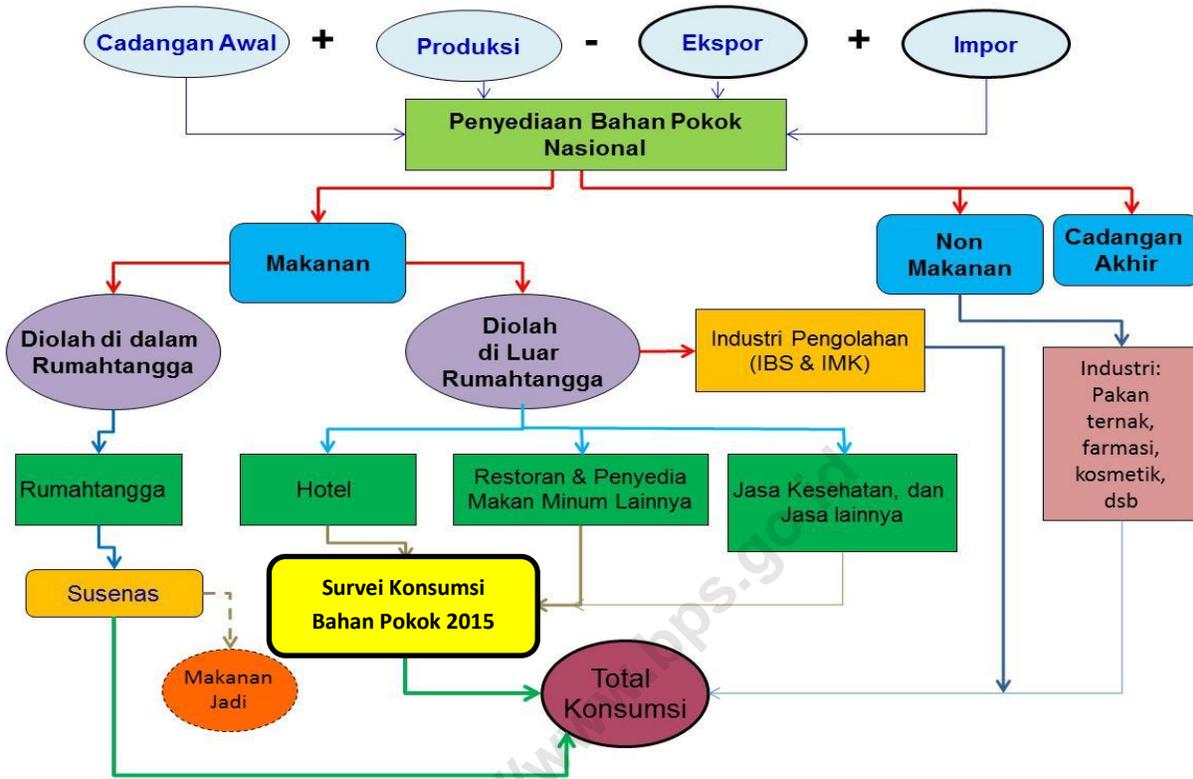
Secara umum, informasi konsumsi bahan pokok yang dikumpulkan berasal dari dua kelompok utama yaitu perusahaan menengah besar dan perusahaan/usaha mikro kecil. Perusahaan menengah besar meliputi perusahaan industri besar sedang, perusahaan penyediaan akomodasi (hotel), perusahaan restoran/rumah makan kategori Usaha Menengah Besar (PD), perusahaan jasa boga/catering kategori Usaha Menengah Besar (PD), dan perusahaan/usaha rumah sakit. Sedangkan perusahaan/usaha kecil meliputi perusahaan/usaha penyediaan makanan dan minuman serta industri mikro kecil yang menggunakan bahan pokok.

Perusahaan/usaha penyediaan akomodasi hanya mencakup hotel berbintang. Sementara **perusahaan/usaha penyediaan makanan dan minuman** meliputi restoran, warung makan, jasa boga/catering untuk suatu *event* tertentu, kedai makanan, serta penyedia makanan dan minuman keliling.

2.3 Kerangka Analisis Penghitungan Perkiraan Konsumsi Bahan Pokok

Penghitungan perkiraan konsumsi bahan pokok secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.1. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penyediaan bahan pokok berasal dari stok awal, produksi, dan impor, kemudian dikurangi dengan stok. Kemudian penyediaan digunakan untuk konsumsi yang dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi bahan pokok untuk makanan dan konsumsi bahan pokok untuk bukan makanan. Selanjutnya konsumsi bahan pokok untuk makanan juga dibedakan menjadi dua kelompok yaitu bahan pokok yang diolah di dalam rumah tangga dan bahan pokok yang diolah di luar rumah tangga. Konsumsi bahan pokok yang diolah di luar rumah tangga diperkirakan dari penggunaan bahan pokok di industri, hotel, jasa penyediaan makanan dan minuman, dan jasa kesehatan. Bahan pokok yang dikonsumsi sebagai bukan bahan makanan penduduk antara lain digunakan sebagai pakan ternak, bahan baku industri nonmakanan (industri pakan ternak, industri kosmetik, industri kimia, dan sebagainya).

Gambar 2.1 Diagram Penghitungan Kebutuhan Bahan Pokok



2.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan sepenuhnya didasarkan pada analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang konsumsi bahan pokok dari berbagai sumber data. Analisis deskriptif didasarkan pada tabel dan grafik hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Konsumsi Bahan Pokok.

2.5 Metode Perkiraan Konsumsi Bahan Makanan

Berdasarkan bentuknya, konsumsi bahan pokok di masyarakat dapat berupa bahan pokok yang dimasak di dalam rumah tangga dan makanan jadi yang harus dibeli dari luar rumah tangga. Pada dasarnya kedua informasi tersebut sudah tercakup dalam Susenas, namun karena proporsi penggunaan bahan pokok dalam makanan jadi di Susenas belum terinformasi dengan baik, maka perkiraan penghitungan konsumsi bahan pokok dari makanan jadi menjadi kurang akurat. Oleh karena itu untuk memperkirakan makanan jadi oleh rumah tangga digunakan pendekatan dari sisi penyediaan

(*establishment*). Berikut adalah penjelasan ringkas masing-masing metode perkiraan konsumsi bahan pokok yang digunakan dalam kajian konsumsi bahan pokok 2017.

2.5.1 Perkiraan Konsumsi Bahan Pokok di Dalam Rumah tangga (Susenas)

Tingkat konsumsi bahan pokok di dalam rumah tangga (diolah dan dikonsumsi sendiri) yang diperoleh dari data Susenas berdasarkan pendataan konsumsi riil rumah tangga selama seminggu yang lalu pada periode referensi survei. Survei dilakukan dengan mengambil sampel yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Perkiraan yang dihasilkan dari Susenas dapat berupa konsumsi bahan pokok di dalam rumah untuk seluruh penduduk Indonesia maupun per kapita. Perkiraan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan metode panarikan sampel (*sampling*) yang digunakan dalam Susenas. Perkiraan konsumsi bahan pokok dihitung untuk jangka waktu setahun dengan cara mengalikan hasil konsumsi selama seminggu dengan 365/7.

2.5.2 Perkiraan Konsumsi Bahan Pokok di Luar Rumah tangga (VKBP 2017)

Estimasi nasional maupun provinsi mengenai penggunaan/konsumsi bahan pokok di luar rumah tangga yang bersumber dari hasil Survei Konsumsi Bahan Pokok 2017 diperoleh dengan cara mengelompokkan beberapa kegiatan yaitu kelompok industri besar sedang, industri mikro kecil, jasa penyedia akomodasi, restoran/rumah makan, penyedia makanan dan minuman lainnya (warung makan, kedai makan, rumah minum/kafe, catering, pedagang keliling dan usaha pembuatan makanan berbahan dasar bahan pokok yang dijual pada konsumen akhir), dan jasa kesehatan.

Desain pengambilan sampel menggunakan dua tahap (*two stage sampling*) pada perusahaan dan tiga tahap (*three stage sampling*) pada usaha rumah tangga, sehingga untuk menghasilkan perkiraan besaran konsumsi sepuluh bahan pokok pada level nasional maupun provinsi juga memperhatikan desain *sampling* tersebut khususnya dalam hal pembobotan (*weighting*).

Prosedur untuk memperoleh estimasi nasional dan provinsi mengenai penggunaan/konsumsi bahan pokok dari Survei Konsumsi Bahan Pokok 2017 disusun berdasarkan dua estimasi, yaitu estimasi untuk perusahaan penyedia akomodasi, restoran, rumah sakit, dan catering, serta estimasi untuk perusahaan penyediaan makanan dan minuman pengguna bahan pokok. Skema *sampling* dan estimasi karakteristik untuk Perusahaan Penyedia Akomodasi, Restoran, Rumah Sakit, Catering, serta Usaha Penyedia Makanan dan Minuman dapat dilihat pada Lampiran.

2.6 Metode Perkiraan Konversi Bahan Pokok

2.6.1 Metode Perkiraan Konversi Beras kedalam Tepung

Dalam memperkirakan konsumsi beras khususnya pada bahan makanan yang berasal dari tepung, baik tepung beras maupun tepung ketan, dilakukan dengan menggunakan angka konversi. Angka konversi yang digunakan dalam survei ini didasarkan pada hasil survei Industri Besar Sedang dengan pertimbangan bahwa tepung beras umumnya diproduksi secara besar-besaran oleh Industri Besar Sedang. Selain itu angka konversi yang dihasilkan dari proses pengolahan beras menjadi tepung beras yang terjadi pada industri pengolahan mencerminkan keadaan riil di lapangan. Hasil survei industri pengolahan yang mengolah beras menjadi tepung beras dari sejumlah industri diperoleh angka konversi sebesar 1,06. Artinya setiap 1,06 kg beras secara rata-rata akan menghasilkan tepung beras sebanyak 1 kg. Sebagai catatan tambahan, angka tersebut telah diverifikasi dengan sejumlah industri pengolahan dan hasilnya tidak jauh berbeda.

2.6.2 Metode Perkiraan Konversi Berbagai Bentuk Jagung kedalam Jagung Pipilan

Bentuk Jagung	Jagung berkulit basah	Jagung berkulit kering	Jagung ontongan basah (tanpa kulit dan tangkai)	Jagung lepas kulit kering	Jagung pipilan kering	Jagung berasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jagung berkulit basah	100,00					
Jagung berkulit kering	75,00	100,00				
Jagung ontongan basah (tanpa kulit dan tangkai)	68,70	91,70	100,00			
Jagung lepas kulit kering	60,00	80,00	87,30	100,00		
Jagung pipilan kering	39,00	52,00	56,73	65,00	100,00	
Jagung berasan	36,00	48,00	52,40	60,00	93,00	100,00

Penghitungan konsumsi jagung pada kajian ini merujuk pada bentuk jagung pipilan kering. Untuk memperkirakan konsumsi jagung pipilan kering yang berasal dari penggunaan bentuk lain seperti jagung basah berkulit, jagung basah tidak berkulit, jagung berasan dan tepung jagung/maizena dilakukan penyetaraan dengan menggunakan angka konversi. Angka konversi yang digunakan dalam kajian ini dikutip dari Buku Pedoman Neraca Bahan Makanan (NBM), Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Dari Buku Pedoman NBM tersebut diperoleh angka konversi seperti tabel diatas.

2.6.3 Metode Perkiraan Konversi Bawang Merah dan Cabai

Penghitungan konsumsi bawang merah pada kajian ini merujuk pada bentuk bawang merah utuh/segar (kering konsumsi). Untuk memperkirakan konsumsi bawang merah utuh/segar yang berasal dari penggunaan bentuk lain seperti bawang merah giling dan bawang merah goreng dilakukan penyetaraan dengan menggunakan angka konversi. Angka konversi yang digunakan dalam kajian ini didasarkan pada hasil pengamatan dan penelitian di beberapa pasar yang menjual bawang merah giling dan bawang merah goreng. Dari pengamatan dan penelitian tersebut diperoleh hasil seperti berikut ini;

- a. Konversi dari bawang merah utuh/segar menjadi bawang merah giling diperoleh angka sebesar 1,01. Artinya setiap 1 kg bawang merah utuh secara rata-rata dari beberapa pedagang akan menghasilkan bawang merah giling sebanyak 1,01 kg.
- b. Konversi dari bawang merah utuh/segar menjadi bawang merah goreng diperoleh angka sebesar 0,27. Artinya setiap 1 kg bawang merah utuh secara rata-rata dari beberapa pedagang akan menghasilkan bawang merah goreng sebanyak 0,27 kg.

Untuk penghitungan konsumsi cabai merujuk pada cabai utuh/segar. Angka konversi untuk menyetarakan konsumsi cabai kering, cabai giling, dan cabai bubuk masing-masing didasarkan pada:

- a. Hasil kajian dari Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian diperoleh angka konversi dari cabai utuh/segar ke cabai kering sebesar 0,11. Artinya setiap 1 kg cabai segar secara rata-rata dari akan menghasilkan cabai kering sebanyak 0,11 kg.
- b. Hasil pengamatan dan penelitian beberapa pedagang bumbu giling di pasar diperoleh angka konversi dari cabai utuh/segar ke cabai giling sebesar 1,01. Artinya setiap 1 kg cabai segar secara rata-rata dari akan menghasilkan cabai giling sebanyak 1,01 kg.
- c. Untuk mengetahui angka konversi dari cabai bubuk ke cabai utuh/segar melalui dua asumsi tahap kegiatan. Tahap pertama, cabai bubuk berasal dari cabe kering yang diasumsikan konversi cabai bubuk ke cabai kering setara dengan konversi tepung beras ke beras, yaitu sebesar 1,06. Tahap kedua, angka konversi cabai kering ke cabai segar sebesar $1/0,11$ (9,09). Sehingga angka konversi cabai bubuk ke cabai segar diasumsikan sebesar $1,06 \times 9,09$ sama dengan 9,64, artinya setiap 1 kg cabai bubuk secara rata-rata akan berasal dari cabai segar sebanyak 9,64 kg.

2.6.4 Metode Perkiraan Konversi Daging Sapi dan Kerbau

Penghitungan konsumsi daging sapi dan kerbau pada kajian ini merujuk pada bentuk daging sapi dan kerbau tanpa tulang. Untuk memperkirakan konsumsi daging sapi dan kerbau tanpa tulang yang

berasal dari penggunaan bentuk lain seperti tetelan dan tulang iga sapi dan kerbau dilakukan penyetaraan dengan menggunakan angka konversi. Berdasarkan studi dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dalam “Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan”, diperoleh angka konversi dari tetelan dan tulang iga sapi dan kerbau ke daging sapi tanpa tulang masing-masing sebesar 0,20 dan 0,05. Artinya setiap 1 kg tetelan dan tulang iga sapi dan kerbau secara rata-rata akan menghasilkan daging sapi dan kerbau tanpa tulang masing-masing adalah 0,20 kg dan 0,05 kg.

2.6.5 Metode Perkiraan Konversi Kedelai

Penghitungan konsumsi kedelai pada kajian ini merujuk pada bentuk kedelai biji kering. Untuk memperkirakan konsumsi kedelai biji kering yang berasal dari penggunaan bentuk lain seperti kedelai dengan batang dan daun basah dilakukan penyetaraan dengan menggunakan angka konversi. Berdasarkan studi dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan diperoleh angka konversi dari kedelai dengan batang dan daun basah ke kacang kedelai biji kering sebesar 0,182. Artinya setiap 1 kg kacang kedelai dengan batang dan daun basah secara rata-rata akan menghasilkan kacang kedelai biji kering 0,182 kg.

2.6.6 Metode Perkiraan Konversi Telur

Penghitungan konsumsi telur pada kajian ini merujuk pada satuan kilogram (kg), sementara data hasil susenas menggunakan satuan butir. Untuk memperkirakan besaran konsumsi telur yang berasal dari susenas dilakukan penyetaraan dengan menggunakan angka konversi. Berdasarkan studi dari Direktur Jenderal Peternakan diperoleh angka konversi telur dari satuan butir menjadi kilogram (kg) sebanyak 16,096 butir telur ayam ras atau 13,974 butir telur bebek/itik. Artinya setiap 1 kg telur secara rata-rata akan berisi sebanyak 16,096 butir telur ayam ras atau 13,974 butir telur bebek/itik.

2.6.7 Metode Perkiraan Konversi Susu Sapi

Penghitungan konsumsi susu pada kajian ini merujuk pada satuan kilogram (kg), sementara data hasil susenas menggunakan satuan liter. Untuk memperkirakan besaran konsumsi susu yang berasal dari susenas dilakukan penyetaraan dengan menggunakan angka konversi. Berdasarkan studi dari Direktur Jenderal Peternakan diperoleh angka konversi susu dari satuan liter menjadi kilogram (kg) sebanyak 1,028 kg. Artinya setiap 1 liter susu segar secara rata-rata akan diperoleh sebanyak 1,028 kg.

3

PEMBAHASAN

<https://www.pps.go.id>

Bahan pokok merupakan bahan makanan utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk dapat menjalani kehidupan secara layak. Oleh karena itu ketersediaan barang-barang tersebut serta kelancaran distribusinya perlu terjamin agar dapat tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan harga yang wajar serta dapat terjangkau. Hambatan dalam penyediaan dan distribusi barang tersebut dapat menimbulkan kelangkaan. Terganggunya persediaan barang dapat menyebabkan terjadinya lonjakan harga yang pada akhirnya dapat berdampak pada gejolak sosial dalam masyarakat. Kelangkaan barang dan lonjakan harga setidaknya dapat diantisipasi apabila telah diketahui perkiraan kebutuhan dan segera dilakukan pelaksanaan pengadaan baik berasal dari produk lokal, luar daerah maupun impor. Disamping itu, perlu juga diketahui perkiraan cadangan dari setiap jenis komoditas kebutuhan pokok dan barang penting lainnya agar terjaga stabilitas harga dan distribusinya.

Jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tergantung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Pertambahan jumlah penduduk juga ikut berperan pada peningkatan permintaan bahan pangan pokok, sehingga tingkat konsumsi bahan pangan pokok ikut meningkat. Jika kenaikan permintaan bahan pangan pokok ini tidak diimbangi dengan kenaikan produksi bahan pangan pokok tersebut, maka akan berakibat pada terganggunya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah berkewajiban memperhatikan ketersediaan bahan pangan pokok di masyarakat. Dalam rangka menentukan kebijakan yang tepat mengenai pemenuhan kebijakan penyediaan bahan pokok ini, diperlukan data tentang konsumsi, produksi, stok, serta distribusinya. Untuk mengetahui kebutuhan bahan pokok di masyarakat, maka perlu dilakukan kajian konsumsi bahan pokok yang diharapkan dapat memberikan data/informasi mengenai tingkat konsumsi bahan pokok. Berikut disajikan informasi mengenai tingkat konsumsi bahan pokok masyarakat seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur ayam dan itik, susu sapi segar, ikan segar, bawang merah, dan cabe. Informasi ini merupakan hasil dari kajian konsumsi bahan pokok yang dilaksanakan pada tahun 2017, baik yang berasal dari konsumsi di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

3.1 Konsumsi Beras

Pangan merupakan kebutuhan yang vital bagi manusia. Salah satu jenis komoditas pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah beras. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Preferensi penduduk terhadap beras demikian besarnya, bahkan penduduk yang mempunyai pola pangan pokok bukan beras beralih ke beras karena beras dianggap

merupakan sumber kalori dan protein yang utama. Disamping itu, beras jugadianggap memiliki citra pangan yang lebih baik secara sosial.

Kondisi tersebut menyebabkan komoditas beras mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kestabilan perekonomian nasional. Beras juga mempunyai peran yang strategis dalam ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan stabilitas politik nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia menghendaki agar pasokan dan harga beras dapat stabil, tersedia sepanjang waktu serta dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu pemerintah selalu bertekad untuk mencapai swasembada beras dengan tingkat harga yang dapat terjangkau masyarakat. Untuk itu dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, pemerintah membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pemerintah seperti pembelian gabah petani saat panen raya dan penetapan harga dasar gabah serta pengendalian harga di tingkat konsumen merupakan salah satu upaya agar masyarakat dapat mengkonsumsi beras dengan layak. Kebijakan yang lainnya seperti program penyaluran beras bagi keluarga yang tidak mampu atau yang dikenal dengan RASKIN.

Berdasarkan hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok menunjukkan bahwa tingkat konsumsi beras cenderung stabil dari tahun 2011 sampai dengan 2015, meskipun terlihat mulai menurun pada tahun 2017. Konsumsi terhadap komoditas beras selama tahun 2011, baik yang diolah di dalam rumah tangga maupun yang diolah di luar rumah tangga mencapai sekitar 113,72 kg, atau rata-rata sekitar 3 ons per kapita per hari. Konsumsi beras selama tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 114,80 kg perkapita per tahun sedangkan pada tahun 2014 dari sedikit menurun menjadi 114,13 kg per kapita per tahun. Sementara itu pada tahun 2015, konsumsi beras cenderung meningkat kembali menjadi 114,61 kg per kapita per tahun. Berdasarkan hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok pada tahun 2017 menunjukkan bahwa total konsumsi beras selama tahun 2017 mencapai sekitar 29,13 juta ton atau cenderung sedikit menurun sekitar 0,2 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 29,18 juta ton. Sehingga konsumsi beras perkapita per tahunnya menjadi 111,58 kg. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan tingkat konsumsi beras yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia selama tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara rata-rata, konsumsi beras per kapita per hari pada tahun 2012, 2014, 2015 dan 2017 sama dengan tahun 2011, yaitu masih sekitar 3 ons perhari per orang.

Tabel 3.1 memperlihatkan data mengenai perkiraan konsumsi beras nasional secara total yang dihitung dari gabungan beberapa sumber survei, yaitu Susenas, Survei Industri Besar Sedang (IBS), Survei Industri Mikro Kecil (IMK), dan Survei Konsumsi Bahan Pokok (VKBP). Unit penelitian yang dijadikan responden

adalah rumah tangga pada survei Susenas untuk melihat konsumsi di dalam rumah tangga, sedangkan responden dari Survei Konsumsi Bahan Pokok (VKBP) tahun 2017 adalah perusahaan Industri Besar Sedang (IBS), perusahaan/usaha Industri Mikro Kecil (IMK), Hotel, Restoran dan Catering, Rumah Makan dan Usaha Penyedia Makanan Minuman Lainnya, serta Jasa Kesehatan untuk melihat konsumsi di luar rumah tangga. Survei konsumsi beras mulai dilaksanakan pada tahun 2011 dengan nama Survei Konsumsi dan Cadangan Beras sedangkan pada tahun 2012 berubah nama menjadi Survei Konsumsi

Tabel 3.1 Konsumsi Beras, 2011-2017

Institusi	2011		2012		2014	
	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah tangga	21 659 173	90,10	21 345 465	87,63	21 378 122	85,04
Hotel	23 118	0,10	26 009	0,11	25 098	0,10
Restoran dan Catering	29 073	0,12	30 235	0,12	47 155	0,19
Rumah makan dan PMM Lainnya	4 931 114	20,51	4 510 826	18,52	4 856 827	19,32
Industri Besar Sedang	114 438	0,48	130 587	0,54	178 173	0,71
Industri Mikro Kecil	130 925	0,54	1 874 208	7,69	1 943 245	7,73
Jasa Kesehatan	346 152	1,44	11 588	0,05	24 129	0,10
Jasa Lainnya	103 365	0,43	32 954	0,14	239 357	0,95
Total	27 337 358	113,72	27 961 872	114,80	28 692 107	114,13

Institusi	2015			2017		
	Total (ton)	Per Kapita (kg)		Total (ton)	Per Kapita (kg)	
		Per Tahun	Per Hari		Per Tahun	Per Hari
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Rumah tangga	21 614 072	84,90	0,233	21 307 828	81,61	0,224
Hotel	25 224	0,10	0,000	28 962	0,11	0,000
Restoran dan Catering	34 860	0,14	0,000	90 309	0,35	0,001
Rumah makan dan PMM Lainnya	4 706 149	18,48	0,051	5 643 712	21,62	0,059
Industri Besar Sedang	82 203	0,32	0,001	86 396	0,33	0,001
Industri Mikro Kecil	2 492 029	9,79	0,027	1 942 647	7,44	0,020
Jasa Kesehatan	93 069	0,37	0,001	33 660	0,13	0,000
Jasa Lainnya	131 333	0,52	0,001			
Total	29 178 940	114,61	0,314	29 133 513	111,58	0,306

Catatan: PMM=Penyedia Makanan Minuman

Tabel 3.2 Total Konsumsi Beras per Tahun Menurut Provinsi (ribu ton), 2015 dan 2017

Provinsi	2015			2017		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	478,47	75,86	554,33	475,85	176,52	652,37
Sumatera Utara	1 333,47	157,02	1 490,49	1 315,30	316,08	1 631,38
Sumatera Barat	472,20	116,00	588,20	468,88	182,08	650,96
Riau	521,46	48,48	569,94	521,06	94,68	615,74
Jambi	292,11	18,56	310,67	286,61	41,44	328,05
Sumatera Selatan	723,65	64,08	787,73	694,40	117,14	811,54
Bengkulu	186,44	10,02	196,46	177,65	18,15	195,81
Lampung	710,83	46,02	756,85	684,21	78,39	762,59
Kep. Bangka Belitung	115,78	17,31	133,09	115,60	30,26	145,86
Kepulauan Riau	134,65	39,01	173,66	135,87	53,23	189,10
DKI Jakarta	691,08	384,27	1 075,35	676,88	551,37	1 228,25
Jawa Barat	4 047,69	3 679,20	7 726,89	3 963,46	2 183,59	6 147,05
Jawa Tengah	2 509,94	983,83	3 493,77	2 471,62	1 214,84	3 686,47
DI Yogyakarta	240,32	160,89	401,21	259,40	158,10	417,50
Jawa Timur	3 101,33	926,58	4 027,91	2 995,20	1 277,70	4 272,90
Banten	1 015,39	171,31	1 186,70	1 031,16	256,90	1 288,06
Bali	407,14	119,54	526,68	394,68	131,79	526,47
Nusa Tenggara Barat	520,26	66,41	586,67	499,20	106,74	605,94
Nusa Tenggara Timur	534,68	26,73	561,41	566,84	65,32	632,15
Kalimantan Barat	449,24	40,06	489,30	429,00	50,73	479,74
Kalimantan Tengah	226,94	13,84	240,78	216,04	38,01	254,05
Kalimantan Selatan	329,65	67,45	397,10	334,17	118,22	452,39
Kalimantan Timur	252,15	36,25	288,40	244,07	75,28	319,35
Kalimantan Utara	49,01	3,92	52,93	51,67	8,98	60,65
Sulawesi Utara	234,04	35,45	269,49	224,84	43,14	267,98
Sulawesi Tengah	275,06	24,65	299,71	284,24	70,64	354,88
Sulawesi Selatan	820,22	130,68	950,90	809,07	139,11	948,18
Sulawesi Tenggara	250,90	40,59	291,49	254,54	52,69	307,23
Gorontalo	105,44	20,09	125,53	104,18	28,35	132,53
Sulawesi Barat	136,86	3,90	140,76	142,01	25,45	167,46
Maluku	128,68	17,06	145,74	130,12	58,83	188,95
Maluku Utara	81,62	6,82	88,44	87,04	18,85	105,90
Papua Barat	67,77	5,50	73,27	68,50	20,15	88,65
Papua	169,58	7,50	177,08	194,45	22,95	217,40
Indonesia	21 614,07	7 564,87	29 178,94	21 307,83	7 825,69	29 133,51

Ket. : Data Susenas Triwulan I 2015 dan 2017

Tabel 3.3 Konsumsi Beras per Kapita per Tahun Menurut Provinsi (kg), 2015 dan 2017

Provinsi	2015			2017		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (SKB)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	96,12	15,24	111,36	92,11	34,17	126,28
Sumatera Utara	95,97	11,30	107,27	92,48	22,22	114,71
Sumatera Barat	91,16	22,39	113,55	88,37	34,32	122,69
Riau	82,71	7,69	90,39	78,73	14,31	93,04
Jambi	86,23	5,48	91,71	81,87	11,84	93,70
Sumatera Selatan	90,18	7,99	98,17	84,27	14,22	98,48
Bengkulu	99,84	5,36	105,21	92,20	9,42	101,62
Lampung	87,82	5,69	93,50	82,75	9,48	92,23
Kep. Bangka Belitung	84,79	12,68	97,47	81,20	21,26	102,46
Kepulauan Riau	68,73	19,91	88,65	65,67	25,73	91,40
DKI Jakarta	68,17	37,91	106,08	65,40	53,27	118,67
Jawa Barat	86,95	79,03	165,98	82,79	45,61	128,40
Jawa Tengah	74,45	29,18	103,64	72,27	35,52	107,80
DI Yogyakarta	65,51	43,86	109,36	69,14	42,14	111,28
Jawa Timur	79,96	23,89	103,84	76,33	32,56	108,90
Banten	85,38	14,40	99,79	83,25	20,74	103,99
Bali	98,32	28,87	127,19	93,20	31,12	124,32
Nusa Tenggara Barat	107,94	13,78	121,71	101,04	21,60	122,64
Nusa Tenggara Timur	104,86	5,24	110,10	107,64	12,40	120,04
Kalimantan Barat	94,16	8,40	102,56	87,29	10,32	97,61
Kalimantan Tengah	91,47	5,58	97,04	83,37	14,67	98,04
Kalimantan Selatan	82,97	16,98	99,95	81,43	28,81	110,24
Kalimantan Timur	73,99	10,64	84,63	68,62	21,17	89,79
Kalimantan Utara	77,08	6,17	83,24	75,46	13,12	88,57
Sulawesi Utara	97,28	14,74	112,02	91,59	17,57	109,16
Sulawesi Tengah	96,00	8,60	104,60	96,19	23,90	120,09
Sulawesi Selatan	96,52	15,38	111,89	93,33	16,05	109,37
Sulawesi Tenggara	100,90	16,32	117,23	98,30	20,35	118,65
Gorontalo	93,40	17,80	111,20	89,51	24,36	113,87
Sulawesi Barat	107,25	3,05	110,30	107,19	19,21	126,40
Maluku	76,63	10,16	86,79	74,90	33,86	108,76
Maluku Utara	70,58	5,90	76,49	72,33	15,67	88,00
Papua Barat	78,25	6,35	84,60	75,29	22,14	97,43
Papua	54,10	2,39	56,49	59,82	7,06	66,88
Indonesia	84,90	29,71	114,61	81,61	29,97	111,58

Ket. : Data Susenas Triwulan I 2015 dan 2017

Beras. Mulai tahun 2014 hingga 2017 namanya berubah menjadi Survei Konsumsi Bahan Pokok atau VKBP. Pada tahun 2014, karena keterbatasan jumlah sampel, maka melibatkan juga data dari Survei Industri Besar Sedang (IBS) dan Survei Industri Mikro Kecil (IMK).

Konsumsi beras yang terbesar selama tahun 2011-2017 terjadi di dalam rumah tangga, diikuti oleh Rumah Makan dan Penyedia Makanan Minuman Lainnya, serta Industri Mikro Kecil. Namun jika dilihat dari pola konsumsinya, ada penurunan konsumsi beras per kapita yang diolah di dalam rumah tangga. Sebagai kompensasinya, masyarakat mulai beralih mengkonsumsi beras yang diolah di luar rumah tangga dalam bentuk makanan jadi atau makanan siap saji. Hal ini terlihat dari konsumsi beras per kapita di dalam rumah tangga yang turun dari 90,10 kg pada tahun 2011 menjadi 81,61 kg pada tahun 2017. Disisi lain ada peningkatan konsumsi beras per kapita yang diolah di luar rumah tangga dari 23,62 kg pada tahun 2011 menjadi 29,97 kg pada tahun 2017. Secara keseluruhan, pada tahun 2017 terjadi peningkatan konsumsi beras per kapita di luar rumah tangga dengan peningkatan yang cukup besar terjadi pada penggunaan beras sebagai bahan baku pada usaha restoran dan catering.

Pada tahun 2017, jika dilihat menurut provinsi, ada 3 provinsi dengan konsumsi beras yang terbanyak selama setahun yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 6,15 juta ton, Jawa Timur sebesar 4,27 juta ton, dan Jawa Tengah sebesar 3,69 juta ton. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing provinsi tersebut. Dibandingkan dengan hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok tahun 2015, konsumsi beras di Jawa Barat mengalami penurunan sekitar 20,45 persen, meskipun sebagai provinsi yang menyerap beras paling banyak dibandingkan provinsi lain. Sebaliknya di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sekitar 6,08 persen dan 5,52 persen.

Berdasarkan konsumsi per kapita tahun 2017, provinsi dengan konsumsi beras per kapita per tahun tertinggi juga berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 128,40 kg, kemudian Sulawesi Barat sebesar 126,40 kg akibat masih tingginya konsumsi di dalam rumah tangga, dan selanjutnya adalah Aceh sebesar 126,28 kg. Sementara itu, konsumsi beras per kapita tahun 2017 paling rendah terdapat di provinsi Papua yaitu hanya sebesar 66,88 kg, meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

3.2 Konsumsi/Penggunaan Jagung

Jagung merupakan komoditas pangan lain selain beras yang berperan sebagai bahan pokok juga sebagai sumber karbohidrat yang cukup tinggi. Hal ini menempatkan posisi jagung sebagai salah satu diversifikasi konsumsi pangan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap beras. Sebagai komoditas pangan terpenting kedua setelah beras, produksi jagung harus senantiasa ditingkatkan agar

dapat mempertahankan ketersediaan bahan pangan yang cukup dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan komoditas jagung, maka perlu dilakukan peningkatan produktivitas dan daya saing usaha pertanian dalam menanam jagung.

Jagung termasuk komoditas strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya bidang pertanian, mengingat komoditas ini memiliki fungsi multiguna. Jagung selain sebagai bahan pangan manusia juga dapat digunakan sebagai sumber biomas serta bahan baku utama dari industri pengolahan pakan ternak, unggas dan ikan. Disamping itu, jagung juga dapat digunakan sebagai bahan makanan dan minuman serta merupakan komoditas bisnis strategis yang dari waktu ke waktu semakin populer seperti untuk bahan baku pembuatan bihun. Teknologi pengolahan jagung menjadi bihun diharapkan dapat memperkecil penggunaan tepung terigu, sehingga akan mengurangi impor gandum. Sehingga ketersediaan komoditi jagung memerlukan pasokan yang cukup besar.

Tabel 3.4. Penggunaan Jagung, 2014- 2017

Institusi	2014		2015		2017	
	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah tangga	369 339	1,47	455 193	1,79	390 935	1,50
Hotel	790	0,00	857	0,00	815	0,00
Restoran dan Catering	887	0,00	1 291	0,00	12 835	0,05
Rumah makan dan PMM Lainnya	133 623	0,53	129 803	0,51	206 119	0,79
Industri Besar Sedang	6 378 387	25,37	3 694 024	14,51	4 772 792	18,28
Industri Mikro Kecil	81 825	0,33	216 852	0,85	58 061	0,22
Jasa Kesehatan	647	0,00	1 180	0,00	539	0,00
Jasa Lainnya	9	0,00	169	0,00		
Total	6 965 506	27,71	4 499 369	17,67	5 442 095	20,84

Catatan: PMM=Penyedia Makanan Minuman

Berdasarkan Tabel 3.4, total perkiraan konsumsi jagung yang bersumber dari data Susenas dan Survei Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017 mencapai sebesar 5,4 juta ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, penggunaan komoditas jagung selama tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai sekitar 20,95 persen. Peningkatan penggunaan komoditas jagung secara signifikan terjadi di industri besar sedang (IBS) dari 3,69 juta ton menjadi 4,77 juta ton atau naik sekitar 29,20 persen dalam kurun waktu 2 tahun. Disamping itu, kebutuhan jagung untuk bahan baku pada industri besar sedang (IBS) selama tahun 2017 juga cukup besar hingga mencapai sekitar 87,70 persen

Tabel 3.5 Penggunaan Jagung Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Total Konsumsi per Tahun (ton)			Konsumsi per Kapita per Tahun (kg)		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1 873,2	2 120,8	3 994,0	0,36	0,41	0,77
Sumatera Utara	5 335,4	268 316,8	273 652,2	0,38	18,87	19,24
Sumatera Barat	1 572,9	124 254,9	125 827,8	0,30	23,42	23,71
Riau	3 000,7	1 580,6	4 581,4	0,45	0,24	0,69
Jambi	1 343,4	1 885,0	3 228,4	0,38	0,54	0,92
Sumatera Selatan	3 039,3	4 967,0	8 006,3	0,37	0,60	0,97
Bengkulu	1 367,7	6 183,2	7 550,8	0,71	3,21	3,92
Lampung	3 690,4	685 410,1	689 100,5	0,45	82,90	83,34
Kep. Bangka Belitung	411,3	102,9	514,2	0,29	0,07	0,36
Kep. Riau	891,4	541,9	1 433,3	0,43	0,26	0,69
DKI Jakarta	6 947,8	101 326,6	108 274,4	0,67	9,79	10,46
Jawa Barat	14 217,7	1 662 510,8	1 676 728,4	0,30	34,73	35,02
Jawa Tengah	23 559,2	1 230 234,2	1 253 793,4	0,69	35,97	36,66
DI Yogyakarta	2 867,3	5 280,1	8 147,4	0,76	1,41	2,17
Jawa Timur	146 584,8	505 657,0	652 241,8	3,74	12,89	16,62
Banten	3 486,8	49 665,7	53 152,5	0,28	4,01	4,29
Bali	5 185,6	5 476,8	10 662,5	1,22	1,29	2,52
Nusa Tenggara Barat	7 130,5	2 187,8	9 318,3	1,44	0,44	1,89
Nusa Tenggara Timur	93 918,4	6 537,0	100 455,4	17,83	1,24	19,08
Kalimantan Barat	2 502,1	6 158,0	8 660,1	0,51	1,25	1,76
Kalimantan Tengah	1 331,1	4 588,0	5 919,1	0,51	1,77	2,28
Kalimantan Selatan	2 519,3	206 098,1	208 617,4	0,61	50,22	50,84
Kalimantan Timur	2 591,4	4 075,9	6 667,3	0,73	1,15	1,87
Kalimantan Utara	342,3	85,6	427,9	0,50	0,13	0,62
Sulawesi Utara	4 028,9	2 088,8	6 117,7	1,64	0,85	2,49
Sulawesi Tengah	6 763,2	8 319,2	15 082,4	2,29	2,82	5,10
Sulawesi Selatan	18 710,3	147 907,1	166 617,4	2,16	17,06	19,22
Sulawesi Tenggara	7 387,7	2 754,2	10 141,9	2,85	1,06	3,92
Gorontalo	11 126,6	1 774,3	12 900,9	9,56	1,52	11,09
Sulawesi Barat	1 095,8	359,1	1 455,0	0,83	0,27	1,10
Maluku	3 588,5	1 234,4	4 822,9	2,07	0,71	2,78
Maluku Utara	373,0	236,3	609,3	0,31	0,20	0,51
Papua Barat	339,1	800,5	1 139,6	0,37	0,88	1,25
Papua	1 811,3	441,8	2 253,1	0,56	0,14	0,69
Indonesia	390 934,5	5 051 160,3	5 442 094,8	1,50	19,35	20,84

Ket. : Data Susenas Maret 2017

dari total kebutuhan nasional sedangkan untuk konsumsi rumah tangga hanya sekitar 7,18 persen. Secara rata-rata, penggunaan komoditas jagung pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan dari 17,67 kg menjadi 20,84 kg per kapita per tahun.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki total penggunaan komoditas jagung terbanyak dibandingkan provinsi lain, yaitu mencapai sekitar 1,68 juta ton selama tahun 2017. Provinsi berikutnya dengan penggunaan jagung terbanyak pada tahun 2017 adalah Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 1,25 juta ton dan Provinsi Lampung mencapai 0,69 juta ton. Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah kebutuhan untuk pasokan Industri Besar Sedang (IBS) di masing-masing provinsi tersebut, terutama industri pakan ternak. Berdasarkan penggunaan komoditas jagung per kapita selama tahun 2017, menunjukkan bahwa Provinsi Lampung merupakan yang tertinggi hingga mencapai sebesar 83,34 kg, Kalimantan Selatan sebesar 50,84 kg, dan Jawa Tengah sebesar 36,66 kg per tahun.

Perlu diketahui bahwa total penggunaan komoditas jagung tersebut belum mencakup untuk kebutuhan pakan ternak secara langsung, baik oleh perusahaan ternak dan unggas maupun rumah tangga usaha peternakan. Jagung yang dijadikan pakan ternak secara langsung oleh perusahaan peternakan dan rumah tangga usaha peternakan tersebut biasanya dicampur dengan gabah dan biji-bijian lain. Berdasarkan data hasil Survei ST2013 Subsektor Rumah Tangga Usaha Peternakan yang dilakukan pada tahun 2014 dan Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan 2014, menunjukkan bahwa pakan ternak campuran antara jagung, gabah, dan biji-bijian lain tersebut mencapai sekitar 32.128 ton untuk perusahaan ternak dan unggas serta 334.406 ton untuk rumah tangga usaha peternakan.

Informasi penggunaan komoditas jagung yang dikumpulkan dalam survei Konsumsi Bahan Pokok ini meliputi jagung basah dengan kulit, jagung basah tanpa kulit, jagung kering tanpa kulit, jagung pipilan kering, dan jagung pecah/beras jagung, sementara dalam penghitungan total penggunaan disetarakan menjadi jagung pipilan kering. Penggunaan komoditas jagung pipilan kering lebih dominan dibandingkan jenis jagung lainnya, terutama pada penggunaan untuk bahan baku industri besar sedang. Sebagian besar pasokan jagung pipilan kering pada industri besar sedang digunakan sebagai bahan baku untuk industri pakan ternak. Oleh karena itu, ketersediaan jagung sangat mempengaruhi industri peternakan secara luas.

3.3 Konsumsi/Penggunaan Kedelai

Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati yang bermutu tinggi setelah diolah (Muchtadi, 2009). Kebanyakan masyarakat lebih menyukai produk olahan kedelai dari pada

mengonsumsi langsung tanpa diolah. Tahu dan tempe adalah salah satu makanan dari olahan kedelai yang murah dan bergizi tinggi. Olahan lain dari kedelai yang tidak kalah bergizi adalah susu kedelai.

Kebutuhan komoditas kedelai dalam negeri menurut hasil Survei Konsumsi Bahan Pokok 2017 mencapai 3,10 juta ton kedelai biji kering, atau sekitar 11,89 kilogram per kapita (tabel 3.6). Dibandingkan tahun 2015, penggunaan komoditas kedelai selama tahun 2017 mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 15,63 persen. Namun data konsumsi kedelai yang diolah di dalam rumah tangga pada tahun 2015 tidak bisa diperoleh. Hal ini disebabkan karena Susenas yang dilaksanakan pada bulan Maret 2015 tidak memuat pertanyaan mengenai jumlah konsumsi kedelai yang diolah di dalam rumah tangga. Penggunaan komoditas kedelai tersebut tidak sebanding dengan kemampuan Indonesia untuk memproduksi kedelai. Kebutuhan kedelai tersebut baru bisa dipenuhi dari hasil produksi petani dalam negeri sekitar 963 ribu ton kedelai biji kering (Produksi Tanaman Pangan 2015, BPS) atau sekitar 30 persen dari total kebutuhan kedelai nasional. Untuk memenuhi kekurangan penyediaan kedelai dalam negeri tersebut perlu mengimpor dari negara lain.

Tabel 3.6 Penggunaan Komoditas Kedelai, 2014- 2017

Institusi	2014		2015		2017	
	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah tangga	5 663	0,02	-	-	12 079	0,05
Hotel	87	0,00	84	0,00	187	0,00
Restoran dan Catering	137	0,00	77	0,00	2 942	0,01
Rumah makan dan PMM Lainnya	71 728	0,29	85 479	0,34	92 847	0,36
Industri Besar Sedang	337 201	1,34	1 052 961	4,14	330 015	1,26
Industri Mikro Kecil	1 797 381	7,15	1 544 647	6,07	2 665 312	10,21
Jasa Kesehatan	57	0,00	49	0,00	92	0,00
Jasa Lainnya	-	-	484	0,00		
Total	2 212 253	8,80	2 683 782	10,54	3 103 475	11,89

Catatan: PMM=Penyedia Makanan Minuman

Ket. *): Susenas yang dilakukan pada bulan Maret 2015 tidak memuat pertanyaan mengenai konsumsi kacang kedelai yang diolah di dalam rumah tangga.

Kedelai merupakan sumber bahan pangan masa depan yang penting, karena memiliki daya guna yang luas, bergizi tinggi, dan menghasilkan zat-zat antioksidan. Selain sebagai bahan pangan manusia, kedelai juga digunakan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri. Sekitar 96 persen dari total konsumsi kedelai digunakan sebagai bahan baku industri. Penggunaan kedelai yang paling penting dari

Tabel 3.7 Penggunaan Komoditas Kedelai Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Total Konsumsi per Tahun (ton)			Konsumsi per Kapita per Tahun (kg)		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	165,7	10 704,0	10 869,7	0,03	2,07	2,10
Sumatera Utara	285,5	43 716,2	44 001,7	0,02	3,07	3,09
Sumatera Barat	60,2	45 199,4	45 259,7	0,01	8,52	8,53
Riau	198,0	119 565,0	119 763,0	0,03	18,07	18,10
Jambi	65,5	27 504,5	27 569,9	0,02	7,86	7,88
Sumatera Selatan	154,5	39 286,3	39 440,8	0,02	4,77	4,79
Bengkulu	51,9	29 962,7	30 014,5	0,03	15,55	15,58
Lampung	262,9	51 729,6	51 992,5	0,03	6,26	6,29
Kep. Bangka Belitung	28,4	13 573,2	13 601,6	0,02	9,53	9,55
Kep. Riau	68,0	25 257,8	25 325,8	0,03	12,21	12,24
DKI Jakarta	265,1	215 748,6	216 013,6	0,03	20,85	20,87
Jawa Barat	2 183,8	784 304,6	786 488,4	0,05	16,38	16,43
Jawa Tengah	1 051,5	572 158,3	573 209,7	0,03	16,73	16,76
DI Yogyakarta	247,4	81 042,2	81 289,7	0,07	21,60	21,67
Jawa Timur	1 694,2	438 263,1	439 957,3	0,04	11,17	11,21
Banten	368,9	139 226,7	139 595,6	0,03	11,24	11,27
Bali	699,3	33 851,1	34 550,3	0,17	7,99	8,16
Nusa Tenggara Barat	3 222,2	33 722,1	36 944,3	0,65	6,83	7,48
Nusa Tenggara Timur	239,8	69 102,7	69 342,5	0,05	13,12	13,17
Kalimantan Barat	124,5	12 629,0	12 753,5	0,03	2,57	2,59
Kalimantan Tengah	16,8	18 905,2	18 922,0	0,01	7,30	7,30
Kalimantan Selatan	45,9	30 273,5	30 319,4	0,01	7,38	7,39
Kalimantan Timur	102,9	41 049,1	41 151,9	0,03	11,54	11,57
Kalimantan Utara	3,2	10 891,6	10 894,8	0,00	15,91	15,91
Sulawesi Utara	21,2	6 072,7	6 093,8	0,01	2,47	2,48
Sulawesi Tengah	72,2	11 477,6	11 549,9	0,02	3,88	3,91
Sulawesi Selatan	133,1	129 633,2	129 766,3	0,02	14,95	14,97
Sulawesi Tenggara	14,6	9 855,7	9 870,3	0,01	3,81	3,81
Gorontalo	9,7	1 450,9	1 460,6	0,01	1,25	1,25
Sulawesi Barat	18,8	14 135,7	14 154,5	0,01	10,67	10,68
Maluku	2,9	7 080,6	7 083,5	0,00	4,08	4,08
Maluku Utara	10,5	4 253,5	4 264,0	0,01	3,53	3,54
Papua Barat	-	6 903,2	6 903,2	-	7,59	7,59
Papua	190,2	12 866,7	13 056,9	0,06	3,96	4,02
Indonesia	12 079,1	3 091 396,3	3 103 475,4	0,05	11,84	11,89

Ket. : Data Susenas Maret 2017

tanaman kedelai adalah bijinya. biji kedelai inilah yang merupakan bahan baku utama industri pengolahan makanan seperti tahu, tempe, tauco, kecap, mentega, tepung kedelai, dan susu kedelai. Sedangkan limbah yang dihasilkan dari sisa proses pengolahan kedelai berupa ampas tempe dan ampas kecap dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan tambahan pada pakan ternak.

Penggunaan komoditas kedelai di Indonesia tersebar di 34 provinsi, yang tertinggi selama tahun 2017 adalah Provinsi Jawa Barat yang mencapai sebesar 786 ribu ton (Tabel 3.7). Provinsi lain yang cukup besar penggunaan komoditas kedelainya antara lain adalah Jawa Tengah sebesar 573 ribu ton dan Jawa Timur 439 ribu ton. Jika dilihat dari penggunaan per kapita, Provinsi DI Yogyakarta merupakan daerah yang menggunakan kedelai terbanyak, yaitu sekitar 21,67 kg per kapita per tahun dan diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 20,87 kg per kapita per tahun. Hal ini berarti bahwa wilayah-wilayah tersebut memerlukan pasokan kedelai yang cukup besar agar kebutuhan akan kedelai tersebut tidak terganggu.

3.4 Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau

Daging sapi dan kerbau merupakan sumber protein yang sangat penting untuk kecukupan gizi masyarakat. Tingkat konsumsi hasil daging sapi dan kerbau akan menentukan kualitas sumber daya manusia. Sementara konsumsi daging sapi dipengaruhi oleh ketersediaan dan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi daya beli terhadap sumber protein dari ternak tersebut.

Berdasarkan hasil survei Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017, kebutuhan/konsumsi daging sapi dan kerbau mencapai sekitar 704,9 ribu ton, atau sekitar 2,70 kilogram per kapita per tahun. Jika dibandingkan dengan hasil kajian bahan pokok tahun 2015, konsumsi daging sapi mengalami peningkatan sebesar 19,92 persen dalam kurun waktu 2 tahun. Konsumsi daging sapi dan kerbau per kapita per tahun di Indonesia masih tergolong sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, seperti Malaysia (15 kg) dan Filipina (7 kg), apalagi jika dibandingkan negara-negara besar lainnya seperti Australia (90,2 kg), Amerika Serikat (90,04 kg), Argentina (86,5 kg), Brazil (78,04 kg), dan beberapa negara lainnya (<http://www.liputan6.com/bisnis/read>).

Kebutuhan/konsumsi daging sapi dan kerbau sebagian besar dilakukan di rumah makan dan usaha jasa penyedia makanan minuman lainnya, yaitu sekitar 72,06 persen dari total kebutuhan atau konsumsi daging sapi dan kerbau di Indonesia. Sementara kebutuhan daging sapi dan kerbau yang dimasak di rumah tangga hanya sekitar 17,00 persen. Sisanya tersebar di hotel, restoran, industri pengolahan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, ada peningkatan konsumsi daging

sapi dan kerbau sebesar 19,92 persen dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu dari 587 ribu ton pada tahun 2015 menjadi 704 ribu ton pada tahun 2017. Penggunaan daging sapi dan kerbau pada usaha restoran dan catering mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai 386 persen dalam kurun waktu 2 tahun, kemudian industri mikri kecil, hotel dan usaha rumah makan dan penyedia makanan minuman lainnya.

Tabel 3.8 Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau, 2014 - 2017

Institusi	2014 ^{*)}		2015 ^{*)}		2017	
	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah tangga	69 912	0,28	102 941	0,40	119 848	0,46
Hotel	4 658	0,02	5 048	0,02	6 049	0,02
Restoran dan Catering	7 458	0,03	5 665	0,02	27 548	0,11
Rumah makan dan PMM Lainnya	498 747	1,98	433 077	1,70	507 915	1,95
Industri Besar Sedang	4 100	0,02	10 449	0,04	12 211	0,05
Industri Mikro Kecil	15 238	0,06	13 194	0,05	25 167	0,10
Jasa Kesehatan	10 369	0,04	9 213	0,04	6 118	0,02
Jasa Lainnya	21 894	0,09	8 161	0,03		
Total	632 413	2,52	587 747	2,31	704 855	2,70

Catatan: PMM=Penyedia Makanan Minuman

Ket: *) : hanya data daging sapi

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki total konsumsi daging sapi dan kerbau terbesar selama tahun 2017 dibandingkan provinsi lain, yaitu mencapai sekitar 168,83 ribu ton. Provinsi berikutnya dengan konsumsi daging sapi dan kerbau terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 135,74 ribu ton dan Jawa Tengah sebesar 86,08 ribu ton. Konsumsi daging sapi dan kerbau yang cukup tinggi dari ketiga provinsi tersebut ternyata disebabkan oleh tingginya konsumsi daging sapi dan kerbau di luar rumah tangga khususnya pada usaha rumah makan dan jasa penyedia makanan minuman. Sedangkan konsumsi daging sapi dan kerbau yang masih rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Maluku yang masing-masing sebesar 1,1 ribu ton; 1,2 ribu ton; dan 1,3 ribu ton. Sementara itu, konsumsi daging sapi dan kerbau per kapita selama tahun 2017 yang tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai sekitar 6,41 kg perkapita pertahun. Selanjutnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur yang masing-masing sebesar 4,42 kg, 3,53 kg dan 3,46 kg per kapita per tahun.

Tabel 3.9 Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Konsumsi per Tahun (ton)			Konsumsi per Kapita (kg)		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1 293	4 279	5 572	0,25	0,83	1,08
Sumatera Utara	2 454	7 738	10 193	0,17	0,54	0,72
Sumatera Barat	3 214	13 729	16 943	0,61	2,59	3,19
Riau	1 876	6 297	8 173	0,28	0,95	1,23
Jambi	1 158	4 252	5 410	0,33	1,21	1,55
Sumatera Selatan	2 355	9 697	12 052	0,29	1,18	1,46
Bengkulu	626	2 132	2 758	0,32	1,11	1,43
Lampung	1 969	20 762	22 731	0,24	2,51	2,75
Kep. Bangka Belitung	589	2 615	3 204	0,41	1,84	2,25
Kep. Riau	1 440	2 883	4 323	0,70	1,39	2,09
DKI Jakarta	15 498	50 866	66 364	1,50	4,91	6,41
Jawa Barat	28 812	140 018	168 830	0,60	2,92	3,53
Jawa Tengah	7 201	78 883	86 084	0,21	2,31	2,52
DI Yogyakarta	997	9 982	10 979	0,27	2,66	2,93
Jawa Timur	27 125	108 617	135 742	0,69	2,77	3,46
Banten	6 783	33 485	40 268	0,55	2,70	3,25
Bali	772	9 243	10 015	0,18	2,18	2,36
Nusa Tenggara Barat	3 115	18 714	21 829	0,63	3,79	4,42
Nusa Tenggara Timur	3 087	4 482	7 568	0,59	0,85	1,44
Kalimantan Barat	790	3 986	4 775	0,16	0,81	0,97
Kalimantan Tengah	490	4 602	5 092	0,19	1,78	1,96
Kalimantan Selatan	702	5 889	6 591	0,17	1,44	1,61
Kalimantan Timur	1 639	8 517	10 156	0,46	2,39	2,86
Kalimantan Utara	210	1 016	1 226	0,31	1,48	1,79
Sulawesi Utara	397	1 972	2 369	0,16	0,80	0,96
Sulawesi Tengah	595	2 656	3 251	0,20	0,90	1,10
Sulawesi Selatan	2 272	17 085	19 357	0,26	1,97	2,23
Sulawesi Tenggara	430	2 361	2 790	0,17	0,91	1,08
Gorontalo	315	1 268	1 583	0,27	1,09	1,36
Sulawesi Barat	112	1 050	1 162	0,08	0,79	0,88
Maluku	274	1 046	1 321	0,16	0,60	0,76
Maluku Utara	139	1 241	1 380	0,12	1,03	1,15
Papua Barat	150	1 562	1 713	0,17	1,72	1,88
Papua	968	2 084	3 051	0,30	0,64	0,94
Indonesia	119 848	585 007	704 855	0,46	2,24	2,70

Ket. : Data Susenas Maret 2017

3.5 Konsumsi Daging Ayam

Sumber protein hewani lainnya yang disajikan dalam kajian ini adalah daging ayam. Penduduk Indonesia sebagian besar menyukai daging ayam karena beberapa alasan. Selain rasanya enak dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan daging sapi, daging ayam juga mengandung kolesterol rendah. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dan mayoritas menyukai daging ayam ini merupakan potensi bagi industri hilir makanan olahan, termasuk restoran, rumah makan dan penyedia makanan minuman lainnya yang menyajikan masakan cepat saji berbahan dasar ayam. Hal ini sesuai dengan Tabel 3.10 yang menunjukkan bahwa penggunaan daging ayam sebagian besar dilakukan oleh usaha jasa penyedia makanan minuman, yaitu usaha rumah makan dan PMM lainnya, yang mencapai sekitar 44,26 persen dari total konsumsi daging ayam di Indonesia.

Tabel 3.10 Konsumsi Daging Ayam, 2014- 2017

Institusi	2014		2015		2017	
	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah tangga	1 128 030	4,49	1 368 967	5,38	1 683 604	6,45
Hotel	13 704	0,05	179 499	0,70	27 599	0,11
Restoran dan Catering	62 227	0,25	32 738	0,13	101 779	0,39
Rumah makan dan PMM Lainnya	1 945 302	7,74	1 743 717	6,85	1 741 133	6,67
Industri Besar Sedang	30 007	0,12	8 835	0,03	314 736	1,21
Industri Mikro Kecil	12 380	0,05	26 277	0,10	57 226	0,22
Jasa Kesehatan	7 967	0,03	12 669	0,05	7 678	0,03
Jasa Lainnya	5 973	0,02	1 286	0,01		
Total	3 205 590	12,75	3 373 987	13,25	3 933 756	15,07

Catatan: PMM=Penyedia Makanan Minuman

Konsumsi daging ayam di dalam rumah tangga juga cukup tinggi hingga mencapai sekitar 42,80 persen, sedangkan penggunaan daging ayam untuk bahan baku industri manufaktur sebesar 9,46 persen serta usaha restoran dan catering mencapai 2,59 persen. Secara total, konsumsi daging ayam pada tahun 2017 mencapai sekitar 3,93 juta ton, atau sekitar 15,07 kilogram per kapita per tahun (Tabel 3.10). Dibandingkan dengan tahun 2015, ada peningkatan konsumsi daging ayam sekitar 16,59 persen pada tahun 2017. Konsumsi daging ayam yang dicakup dalam kajian ini meliputi ayam ras (ayam potong) dan ayam buras (ayam kampung). Penggunaan ayam ras lebih dominan dibandingkan ayam buras.

Tabel 3.11 Konsumsi Daging Ayam Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Total Konsumsi per Tahun (ton)			Konsumsi per Kapita (kg)		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	20 403	39 453	59 856	3,95	7,64	11,59
Sumatera Utara	73 650	97 485	171 136	5,18	6,85	12,03
Sumatera Barat	36 297	55 004	91 302	6,84	10,37	17,21
Riau	62 893	48 429	111 322	9,50	7,32	16,82
Jambi	28 795	19 030	47 825	8,22	5,44	13,66
Sumatera Selatan	61 294	45 694	106 988	7,44	5,55	12,98
Bengkulu	11 902	8 490	20 393	6,18	4,41	10,58
Lampung	45 599	39 940	85 539	5,51	4,83	10,35
Kep. Bangka Belitung	15 216	11 263	26 479	10,69	7,91	18,60
Kep. Riau	21 208	23 105	44 312	10,25	11,17	21,42
DKI Jakarta	96 160	186 839	282 999	9,29	18,05	27,34
Jawa Barat	392 874	398 443	791 318	8,21	8,32	16,53
Jawa Tengah	190 935	296 704	487 638	5,58	8,68	14,26
DI Yogyakarta	27 210	68 959	96 168	7,25	18,38	25,63
Jawa Timur	207 905	462 020	669 925	5,30	11,77	17,07
Banten	104 801	99 773	204 574	8,46	8,05	16,52
Bali	32 059	46 272	78 331	7,57	10,93	18,50
Nusa Tenggara Barat	20 775	34 440	55 214	4,20	6,97	11,18
Nusa Tenggara Timur	15 460	5 208	20 668	2,94	0,99	3,92
Kalimantan Barat	37 857	19 068	56 924	7,70	3,88	11,58
Kalimantan Tengah	26 155	27 479	53 633	10,09	10,60	20,70
Kalimantan Selatan	29 161	36 023	65 184	7,11	8,78	15,88
Kalimantan Timur	33 419	48 520	81 939	9,40	13,64	23,04
Kalimantan Utara	4 165	3 345	7 511	6,08	4,89	10,97
Sulawesi Utara	8 778	15 484	24 262	3,58	6,31	9,88
Sulawesi Tengah	7 071	12 383	19 453	2,39	4,19	6,58
Sulawesi Selatan	32 674	57 682	90 356	3,77	6,65	10,42
Sulawesi Tenggara	5 593	7 468	13 061	2,16	2,88	5,04
Gorontalo	3 895	4 043	7 939	3,35	3,47	6,82
Sulawesi Barat	2 061	5 524	7 585	1,56	4,17	5,73
Maluku	4 294	6 751	11 045	2,47	3,89	6,36
Maluku Utara	1 698	4 268	5 966	1,41	3,55	4,96
Papua Barat	3 298	5 129	8 426	3,62	5,64	9,26
Papua	18 052	10 433	28 485	5,55	3,21	8,76
Indonesia	1 683 604	2 250 152	3 933 756	6,45	8,62	15,07

Ket. : Data Susenas Maret 2017

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki total konsumsi daging ayam terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain, selama tahun 2017 mencapai sekitar 791 ribu ton. Provinsi berikutnya dengan konsumsi daging ayam terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur 669 ribu ton dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 487 ribu ton. Konsumsi daging ayam yang cukup tinggi selama tahun 2017 pada ketiga provinsi tersebut didorong oleh tingginya konsumsi daging ayam di luar rumah tangga, khususnya pada usaha rumah makan dan usaha jasa penyedia makanan minuman. Meskipun banyaknya konsumsi daging ayam di Provinsi Jawa Barat cukup berimbang antara yang diolah di dalam rumah tangga maupun yang di luar rumah tangga. Sedangkan konsumsi daging ayam yang terendah adalah di Provinsi Maluku Utara sebesar 5,9 ribu ton, Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat masing-masing sebesar 7,5 ribu ton.

Meskipun konsumsi daging ayam di Provinsi Jawa Barat paling tinggi, namun karena jumlah penduduk yang cukup banyak maka konsumsi per kapita selama tahun 2017 tidak setinggi yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Konsumsi daging ayam per kapita per tahun di Provinsi DKI Jakarta mencapai sebesar 27,34 kg. Selanjutnya terjadi di Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai sekitar 25,63 kg per kapita per tahun. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan tingkat kebutuhan konsumsi daging ayam paling rendah yaitu hanya sekitar 3,92 kg per kapita per tahun, sedangkan Provinsi Maluku Utara yang jumlah kebutuhan daging ayamnya paling sedikit juga konsumsi perkapitanya cukup rendah (5,86 kg).

3.6 Konsumsi Telur Ayam Ras dan Telur Bebek/Itik

Telur merupakan salah satu komoditas peternakan yang banyak dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Telur bisa menjadi salah satu sumber protein favorit sebagian besar penduduk. Disamping itu, telur juga menjadi makanan atau lauk yang primadona bagi masyarakat di Indonesia karena mudah diperoleh, cukup terjangkau dan mudah untuk diolah. Sebutir telur terbagi atas putih dan kuning telur, dimana putih telur merupakan sumber protein hewani yang paling bagus sementara kuning telur adalah sumber lemak yang menyimpan banyak kolesterol. Telur yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah telur ayam ras dan telur bebek/itik.

Kebutuhan telur di Indonesia cukup tinggi, selain diolah langsung oleh rumah tangga untuk dikonsumsi sendiri juga banyak digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan makanan jadi serta bahan baku usaha penyedia makanan dan minuman. Hal ini menyebabkan harga telur sering mengalami fluktuasi, terutama menjelang perayaan hari-hari besar seperti lebaran dan natal. Untungnya kebutuhan telur di Indonesia masih bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri atau sudah terjadi swasembada telur di Indonesia sehingga gejolak harga dapat segera diatasi.

Berdasarkan data hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok Tahun 2017 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.12 bahwa penggunaan telur ayam ras dan telur bebek/itik sebagian besar dilakukan oleh rumah tangga untuk diolah sendiri, baik untuk lauk maupun makanan lainnya. Kebutuhan telur ayam dan telur bebek untuk konsumsi di dalam rumah tangga mencapai sekitar 36,65 persen dari total konsumsi telur ayam ras dan telur bebek di Indonesia, kemudian untuk kebutuhan bahan baku industri pengolahan, baik untuk IBS maupun IMK juga masih cukup tinggi hingga mencapai sekitar 31,74 persen. Secara total, konsumsi telur ayam dan telur bebek pada tahun 2017 mencapai sekitar 4,81 juta ton, sedangkan konsumsi perkapitanya mencapai 18,44 kilogram per kapita per tahun. Konsumsi telur ayam dan telur bebek yang dicakup dalam kajian ini hanya meliputi telur ayam ras (ayam petelur) dan telur bebek/itik. Penggunaan telur ayam ras lebih dominan dibandingkan dengan telur bebek/itik.

Tabel 3.12 Konsumsi Telur Ayam dan Telur Bebek/Itik, 2017

Institusi	Total (ton)	Per Kapita per tahun (kg)
(1)	(2)	(3)
Rumah tangga	1 764 647	6,76
Hotel	27 882	0,11
Restoran dan Catering	41 826	0,16
Rumah makan dan PMM Lainnya	1 431 111	5,48
Industri Besar Sedang	45 256	0,17
Industri Mikro Kecil	1 482 804	5,68
Jasa Kesehatan	20 754	0,08
Total	4 814 279	18,44

Catatan: PMM=Penyedia Makanan Minuman

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki kebutuhan telur ayam ras dan telur bebek paling banyak dibandingkan dengan provinsi lain, selama tahun 2017 mencapai sekitar 1,66 juta ton. Provinsi berikutnya dengan konsumsi telur ayam ras dan telur bebek terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat 652 ribu ton dan Provinsi Jawa Timur sebesar 417 ribu ton. Sedangkan konsumsi telur ayam ras dan telur bebek yang terendah adalah di Provinsi Maluku Utara sebesar 7,06 ribu ton, Sulawesi Barat dan Papua Barat masing-masing sebesar 7 ribu ton. Konsumsi telur ayam ras dan telur bebek per kapita selama tahun 2017 yang tertinggi juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah hingga mencapai sebesar 48,62 kg per kapita per tahun. Selanjutnya terjadi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah yang masing-masing mencapai sekitar 31,72 kg dan 27,89 kg per kapita per tahun. Provinsi Nusa Tenggara

Tabel 3.13 Konsumsi Telur Ayam dan Telur Bebek/Itik Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Total Konsumsi per Tahun (ton)			Konsumsi per Kapita (kg)		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34 403	32 778	67 181	6,66	6,34	13,00
Sumatera Utara	94 659	112 258	206 917	6,66	7,89	14,55
Sumatera Barat	39 120	96 632	135 753	7,37	18,21	25,59
Riau	53 282	23 978	77 261	8,05	3,62	11,67
Jambi	23 695	12 626	36 321	6,77	3,61	10,37
Sumatera Selatan	67 169	28 443	95 611	8,15	3,45	11,60
Bengkulu	12 453	6 951	19 405	6,46	3,61	10,07
Lampung	62 718	20 651	83 369	7,59	2,50	10,08
Kep. Bangka Belitung	10 937	10 077	21 014	7,68	7,08	14,76
Kep. Riau	17 916	23 657	41 574	8,66	11,43	20,09
DKI Jakarta	81 350	162 836	244 187	7,86	15,73	23,59
Jawa Barat	379 219	273 668	652 887	7,92	5,72	13,64
Jawa Tengah	212 750	1 449 834	1 662 583	6,22	42,40	48,62
DI Yogyakarta	27 558	91 440	118 998	7,35	24,37	31,72
Jawa Timur	246 040	171 603	417 643	6,27	4,37	10,64
Banten	97 204	113 672	210 876	7,85	9,18	17,02
Bali	28 748	24 600	53 348	6,79	5,81	12,60
Nusa Tenggara Barat	26 611	26 838	53 448	5,39	5,43	10,82
Nusa Tenggara Timur	10 378	6 156	16 534	1,97	1,17	3,14
Kalimantan Barat	32 457	20 802	53 260	6,60	4,23	10,84
Kalimantan Tengah	19 311	52 963	72 274	7,45	20,44	27,89
Kalimantan Selatan	32 109	25 719	57 828	7,82	6,27	14,09
Kalimantan Timur	27 182	24 209	51 391	7,64	6,81	14,45
Kalimantan Utara	4 537	13 183	17 720	6,63	19,25	25,88
Sulawesi Utara	11 072	14 180	25 252	4,51	5,78	10,29
Sulawesi Tengah	11 241	21 906	33 146	3,80	7,41	11,22
Sulawesi Selatan	56 701	143 078	199 779	6,54	16,50	23,04
Sulawesi Tenggara	11 530	13 013	24 543	4,45	5,03	9,48
Gorontalo	3 887	6 465	10 352	3,34	5,56	8,89
Sulawesi Barat	4 799	3 213	8 011	3,62	2,43	6,05
Maluku	5 176	6 242	11 418	2,98	3,59	6,57
Maluku Utara	3 049	4 008	7 057	2,53	3,33	5,86
Papua Barat	3 751	4 466	8 216	4,12	4,91	9,03
Papua	11 636	7 485	19 121	3,58	2,30	5,88
Indonesia	1 764 647	3 049 633	4 814 280	6,76	11,68	18,44

Ket. : Data Susenas Maret 2017

Timur merupakan provinsi dengan tingkat kebutuhan konsumsi telur ayam ras dan telur bebek paling rendah yaitu hanya sekitar 3,14 kg per kapita per tahun, sedangkan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua masing-masing hanya sebesar 5,86 kg dan 5,88 kg per kapita per tahun.

3.7 Konsumsi Susu Sapi Segar

Salah satu komponen dari subsektor peternakan yang memiliki banyak manfaat dan berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah agribisnis persusuan. Kondisi geografis, ekologi, dan kesuburan lahan di beberapa wilayah Indonesia memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan agribisnis persusuan. Selain itu, dari sisi konsumsi, produksi susu dalam negeri masih belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Susu sapi merupakan suatu emulsi lemak di dalam air yang mengandung gula, garam-garam, mineral dan protein dalam bentuk koloid (Buckle et al, 1987). Susu sapi merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, yang dewasa ini sebagian besar dimanfaatkan sebagai bahan pangan, baik diminum dalam keadaan segar maupun diolah menjadi produk tertentu. Susu merupakan bahan pangan yang tersusun oleh zat-zat makanan dengan proporsi seimbang. Di dalam susu terkandung vitamin B2 dan vitamin A, selain protein juga terdapat macam-macam asam amino yang penting untuk pertumbuhan tubuh. Sekarang, susu sapi dijuluki sebagai bahan makanan dengan kandungan vitamin lengkap, juga sebagai “darah putih” yang membantu kesehatan tubuh manusia.

Tabel 3.14 Konsumsi Susu Sapi Segar, 2017

Institusi	Total (ton)	Per Kapita per tahun (kg)
(1)	(2)	(3)
Rumah tangga	79 272	0,30
Hotel	8 243	0,03
Restoran dan Catering	28 925	0,11
Rumah makan dan PMM Lainnya	124 388	0,48
Industri Besar Sedang	966 627	3,70
Industri Mikro Kecil	53 476	0,20
Jasa Kesehatan	572	0,00
Total	1 261 503	4,83

Catatan: PMM=Penyedia Makanan Minuman

Tabel 3.15 Konsumsi Susu Sapi Segar Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Total Konsumsi per Tahun (ton)			Konsumsi per Kapita (kg)		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	293	27	320	0,06	0,01	0,06
Sumatera Utara	1 912	652	2 564	0,13	0,05	0,18
Sumatera Barat	813	728	1 541	0,15	0,14	0,29
Riau	496	138	633	0,07	0,02	0,10
Jambi	184	109	293	0,05	0,03	0,08
Sumatera Selatan	770	563	1 333	0,09	0,07	0,16
Bengkulu	48	5	54	0,03	0,00	0,03
Lampung	365	6 334	6 700	0,04	0,77	0,81
Kep. Bangka Belitung	151	264	415	0,11	0,19	0,29
Kep. Riau	273	299	572	0,13	0,14	0,28
DKI Jakarta	13 540	31 857	45 397	1,31	3,08	4,39
Jawa Barat	26 257	214 062	240 319	0,55	4,47	5,02
Jawa Tengah	8 933	814 886	823 820	0,26	23,83	24,09
DI Yogyakarta	1 535	15 018	16 553	0,41	4,00	4,41
Jawa Timur	14 725	88 390	103 115	0,38	2,25	2,63
Banten	5 164	5 811	10 975	0,42	0,47	0,89
Bali	456	1 223	1 679	0,11	0,29	0,40
Nusa Tenggara Barat	443	94	537	0,09	0,02	0,11
Nusa Tenggara Timur	38	-	38	0,01	-	0,01
Kalimantan Barat	193	34	226	0,04	0,01	0,05
Kalimantan Tengah	81	55	137	0,03	0,02	0,05
Kalimantan Selatan	307	134	441	0,07	0,03	0,11
Kalimantan Timur	504	186	690	0,14	0,05	0,19
Kalimantan Utara	-	6	6	-	0,01	0,01
Sulawesi Utara	1 147	119	1 266	0,47	0,05	0,52
Sulawesi Tengah	28	142	171	0,01	0,05	0,06
Sulawesi Selatan	123	834	956	0,01	0,10	0,11
Sulawesi Tenggara	36	135	170	0,01	0,05	0,07
Gorontalo	26	97	123	0,02	0,08	0,11
Sulawesi Barat	8	12	19	0,01	0,01	0,01
Maluku	8	-	8	0,00	-	0,00
Maluku Utara	8	-	8	0,01	-	0,01
Papua Barat	99	5	104	0,11	0,01	0,11
Papua	309	11	321	0,10	0,00	0,10
Indonesia	79 272	1 182 231	1 261 503	0,30	4,53	4,83

Ket. : Data Susenas Maret 2017

Berdasarkan data hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.14 bahwa penggunaan susu sapi segar sebagian besar dilakukan oleh Industri Besar Sedang untuk bahan baku utama pengolahan berbagai jenis makanan atau minuman jadi. Kebutuhan susu sapi segar sebagai bahan baku pada Industri Besar Sedang (IBS) selama tahun 2017 mencapai sekitar 76,63 persen dari total konsumsi susu sapi segar di Indonesia. Sedangkan kebutuhan susu sapi segar untuk dikonsumsi langsung oleh rumah tangga hanya mencapai sekitar 6,28 persen. Kebutuhan susu sapi segar oleh restoran, catering dan usaha penyedia makanan minuman lainnya mencapai sekitar 12,15 persen. Penggunaan susu sapi segar di dalam negeri selama tahun 2017 mencapai sekitar 1,3 juta ton. Perusahaan industri besar sedang (IBS) menggunakan susu sapi segar sebanyak 966,63 ribu ton sedangkan rumah tangga hanya menggunakan 79,27 ribu ton. Sementara itu penggunaan susu sapi segar per kapita di dalam negeri selama tahun 2017 mencapai sebesar 4,83 kilogram per kapita per tahun, yang terdiri dari 3,70 kg perkapita digunakan oleh Industri Besar Sedang (IBS) sebagai bahan baku dan 0,30 kg perkapita digunakan oleh rumah tangga secara langsung, sedangkan sisanya digunakan oleh penyedia makanan minuman lainnya.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang menggunakan susu sapi segar paling banyak dibandingkan dengan provinsi lain, selama tahun 2017 mencapai sekitar 823,8 ribu ton. Provinsi berikutnya dengan penggunaan susu sapi segar terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 240,3 ribu ton dan Provinsi Jawa Timur sebesar 103,1 ribu ton. Sedangkan penggunaan susu sapi segar yang terendah adalah di Provinsi Kalimantan Utara, Maluku dan Maluku Utara yang tidak mencapai 10 ton setahun. Penggunaan susu sapi segar per kapita selama tahun 2017 yang tertinggi juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah hingga mencapai sekitar 24,09 kg per kapita per tahun. Selanjutnya terjadi di Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Provinsi DKI Jakarta yang masing-masing mencapai sekitar 5,02 kg, 4,41 kg dan 4,39 kg per kapita per tahun. Provinsi dengan tingkat kebutuhan susu sapi segar sangat sedikit adalah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur.

3.8 Konsumsi Ikan Segar

Ikan merupakan sumber protein hewani dengan jumlah produksi paling tinggi sehingga kontribusinya terhadap penyediaan protein hewani paling besar. Hal ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan melihat negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya akan sumberdaya hayati laut, dengan potensi sumber daya ikan laut dan biota laut yang sangat berlimpah. Disamping melimpah akan sumberdaya laut, juga kaya akan biota air lainnya seperti yang terdapat di sungai, danau, atau kolam, baik yang di alam bebas maupun yang dibudidayakan masyarakat. Potensi sumber daya air

yang cukup melimpah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi ikan atau biota air lainnya bagi masyarakat.

Ikan merupakan salah satu jenis makanan sehat yang kandungan proteinnya cukup tinggi, rendah lemak jenuh, serta menyimpan asam lemak omega 3 yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga tubuh tetap sehat. Terutama bagi orang yang sedang melakukan program diet, sangat baik untuk memanfaatkan vitamin, mineral, dan nutrisi yang ada dalam kandungan ikan. Berdasarkan data hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.16 bahwa penggunaan berbagai jenis ikan serta biota air lainnya di dalam negeri, baik untuk keperluan bahan baku industri pengolahan, usaha penyedia makanan minuman maupun diolah langsung olah rumah tangga selama tahun 2017 mencapai sebanyak 8,45 juta ton. Penggunaan terbesar dilakukan oleh rumah tangga untuk diolah sendiri yang mencapai sekitar 48,57 persen dari total konsumsi ikan dan biota air lainnya di Indonesia. Sedangkan yang digunakan oleh industri pengolahan, baik IBS maupun IMK, mencapai sekitar 36,74 persen atau sebesar 3,1 juta ton. Sisanya diantaranya digunakan oleh usaha jasa penyedia makanan dan minuman.

Tabel 3.16 Konsumsi Ikan Segar Menurut Institusi Pengguna, 2017

Institusi	Total (ton)	Per Kapita per tahun (kg)
(1)	(2)	(3)
Rumah tangga	4 103 343	15,72
Hotel	5 621	0,02
Restoran dan Catering	24 232	0,09
Rumah makan dan PMM Lainnya	1 657 729	6,35
Industri Besar Sedang	2 523 489	9,67
Industri Mikro Kecil	580 215	2,22
Jasa Kesehatan	5 567	0,02
Total	8 448 307	32,36

Catatan: PMM=Penyedia Makanan Minuman

Konsumsi ikan perkapita selama tahun 2017 mencapai sekitar 32,36 kg. Menurut institusi pengguna menunjukkan bahwa konsumsi ikan dan biota air di rumah tangga cukup tinggi hingga mencapai sekitar 15,72 kg per kapita per tahun. Meskipun masih lebih banyak yang dibutuhkan oleh institusi di luar rumah tangga yang mencapai 16,64 kg per kapita pertahun yang meliputi industri pengolahan, baik IBS maupun IMK, restoran, serta rumah makan dan penyedia makanan minuman.

Tabel 3.17 Konsumsi Ikan Segar Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Total Konsumsi per Tahun (ton)			Konsumsi per Kapita (kg)		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	139 280	34 827	174 107	26,96	6,74	33,70
Sumatera Utara	268 392	288 422	556 815	18,87	20,28	39,15
Sumatera Barat	83 380	216 718	300 098	15,71	40,84	56,56
Riau	129 157	38 556	167 713	19,52	5,83	25,34
Jambi	62 689	34 474	97 164	17,91	9,85	27,75
Sumatera Selatan	177 766	37 612	215 378	21,57	4,56	26,14
Bengkulu	31 749	7 980	39 729	16,48	4,14	20,62
Lampung	134 026	24 358	158 384	16,21	2,95	19,16
Kep. Bangka Belitung	46 140	14 081	60 221	32,41	9,89	42,30
Kep. Riau	58 499	21 212	79 711	28,27	10,25	38,53
DKI Jakarta	169 198	106 438	275 636	16,35	10,28	26,63
Jawa Barat	505 381	313 105	818 485	10,56	6,54	17,10
Jawa Tengah	256 149	1 405 179	1 661 328	7,49	41,09	48,58
DI Yogyakarta	26 112	31 409	57 521	6,96	8,37	15,33
Jawa Timur	466 080	1 211 396	1 677 476	11,88	30,87	42,75
Banten	197 751	42 993	240 744	15,97	3,47	19,44
Bali	34 173	78 882	113 055	8,07	18,63	26,70
Nusa Tenggara Barat	74 570	19 785	94 355	15,09	4,00	19,10
Nusa Tenggara Timur	75 641	25 813	101 455	14,36	4,90	19,27
Kalimantan Barat	96 667	14 589	111 256	19,67	2,97	22,64
Kalimantan Tengah	64 019	11 808	75 826	24,70	4,56	29,26
Kalimantan Selatan	103 642	31 510	135 153	25,26	7,68	32,93
Kalimantan Timur	96 466	27 742	124 208	27,12	7,80	34,92
Kalimantan Utara	21 068	11 589	32 657	30,77	16,92	47,69
Sulawesi Utara	78 650	102 322	180 972	32,04	41,68	73,72
Sulawesi Tengah	80 566	28 874	109 440	27,26	9,77	37,03
Sulawesi Selatan	253 402	38 699	292 100	29,23	4,46	33,69
Sulawesi Tenggara	97 565	36 306	133 871	37,68	14,02	51,70
Gorontalo	36 787	15 317	52 104	31,61	13,16	44,77
Sulawesi Barat	32 815	5 537	38 353	24,77	4,18	28,95
Maluku	67 884	30 078	97 963	39,07	17,31	56,39
Maluku Utara	47 455	8 974	56 429	39,43	7,46	46,89
Papua Barat	30 079	23 362	53 441	33,06	25,68	58,74
Papua	60 144	5 015	65 159	18,50	1,54	20,04
Indonesia	4 103 343	4 344 964	8 448 307	15,72	16,64	32,36

Ket. : Data Susenas Maret 2017

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki kebutuhan ikan dan biota air paling banyak dibandingkan dengan provinsi lain, dimana selama tahun 2017 mencapai sekitar 1,68 juta ton atau sekitar 19,86 persen dari total penggunaan ikan dan biota air di dalam negeri. Provinsi berikutnya dengan konsumsi ikan dan biota air terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,66 juta ton dan Provinsi Jawa Barat sebesar 818 ribu ton. Sedangkan total kebutuhan ikan dan biota air yang terendah adalah di Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Bengkulu yang masing-masing sebesar 32 ribu ton, 38 ribu ton, dan 39 ribu ton. Konsumsi ikan dan biota air per kapita selama tahun 2017 yang tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara hingga mencapai sebesar 73,72 kg per kapita per tahun. Selanjutnya terjadi di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Maluku yang masing-masing mencapai sekitar 58,74 kg dan 56,39 kg per kapita per tahun. Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kebutuhan konsumsi ikan dan biota air paling rendah yaitu hanya sekitar 15,33 kg per kapita per tahun, selanjutnya Provinsi Jawa Barat sebesar 17,10 kg per kapita per tahun.

3.9 Konsumsi Bawang Merah

Bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang memiliki banyak manfaat dan bernilai ekonomis tinggi serta mempunyai prospek pasar yang baik. Di Indonesia, bawang merah sudah menjadi salah satu tanaman sayuran yang menjadi bumbu masak pokok hampir di setiap masakan. Disamping menjadi penyedap makanan, bawang merah juga berguna untuk keperluan lain seperti obat-obatan tradisional dan lain-lain. Banyaknya kegunaan bawang merah ini, maka diperkirakan kebutuhan masyarakat pada bawang merah cukup tinggi setiap tahunnya. Perkembangan industri makanan jadi yang cukup pesat juga berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan bawang merah yang digunakan sebagai salah satu bahan penyedap dalam suatu produk makanan.

Dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah tersebut maka perlu adanya keseimbangan antara produksi dan konsumsi agar kebutuhan dan permintaan pasar dapat terpenuhi. Berdasarkan data hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.18 bahwa penggunaan bawang merah diseluruh wilayah Indonesia selama tahun 2017 sebanyak 1,71 juta ton atau sekitar 6,55 kilogram per kapita per tahun. Penggunaan terbesar dilakukan oleh rumah tangga untuk diolah sendiri yang mencapai sebanyak 671 ribu ton atau sekitar 39,21 persen dari total penggunaan bawang merah di dalam negeri. Penggunaan bawang merah oleh usaha akomodasi (hotel), restoran, catering, warung makan, dan usaha penyedia makanan dan minuman lain mencapai 551,4 ribu ton atau sekitar 32,22 persen dari kebutuhan nasional. Sedangkan yang digunakan oleh industri pengolahan, baik IBS maupun IMK, mencapai sekitar 28,51 persen atau

sebesar 487,9 ribu ton. Sisanya diantaranya digunakan oleh usaha jasa penyedia makanan dan minuman.

Tabel 3.18 Konsumsi Bawang Merah Menurut Institusi Pengguna, 2014- 2017

Institusi	2014		2015		2017	
	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah tangga	625 192	2,49	690 671	2,71	671 068	2,57
Hotel	4 328	0,02	4 584	0,02	1 944	0,01
Restoran dan Catering	2 998	0,01	2 405	0,01	6 623	0,03
Rumah makan dan PMM Lainnya	683 020	2,66	373 311	1,47	542 891	2,08
Industri Besar Sedang	14 765	0,06	1 279	0,01	460 578	1,76
Industri Mikro Kecil	9 470	0,04	35 212	0,14	27 351	0,10
Jasa Kesehatan	1 401	0,01	3 287	0,01	855	0,00
Jasa Lainnya	6 293	0,03	3 340	0,01		
Total	1 332 467	5,30	1 114 089	4,38	1 711 309	6,55

Catatan: PMM=Penyedia Makanan Minuman

Data hasil survei Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017, menunjukkan bahwa konsumsi bawang merah secara nasional mengalami kenaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu dari 1,1 juta ton pada tahun 2015 menjadi menjadi sekitar 1,7 juta ton pada tahun 2017 atau meningkat sekitar 53,61 persen. Konsumsi bawang merah per kapita pada tahun 2015 hanya sekitar 4,38 kg per tahun sedangkan pada tahun 2017 menjadi 6,55 kg per kapita per tahun. Penggunaan bawang merah untuk bahan baku pada usaha industri besar sedang (IBS) mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 460 ribu ton.

Pada tahun 2017, tiga provinsi dengan penggunaan bawang merah terbesar adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Konsumsi bawang merah di Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar 662,53 ribu ton, Jawa Timur sekitar 183,50 ribu ton, dan Jawa Tengah sekitar 154,45 ton. Sedangkan total kebutuhan bawang merah yang terendah adalah di Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat yang masing-masing sebesar 2,1 ribu ton, 2,9 ribu ton, dan 3,0 ribu ton. Sementara jika dilihat dari kebutuhan konsumsi per kapita per tahun, provinsi yang terbanyak membutuhkan komoditi tersebut adalah Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 19,91 kg, kemudian Jawa Barat 13,84 kg dan Sumatera Barat 6,83 kg per kapita per tahun. Penggunaan bawang merah perkapita yang paling rendah adalah provinsi Nusa Tenggara Timur yang hanya sekitar 1,62 kg per kapita per tahun.

Tabel 3.19 Konsumsi Bawang Merah Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Total Konsumsi per Tahun (ton)			Konsumsi per Kapita per Tahun(kg)		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	17 030	14 449	31 479	3,30	2,80	6,09
Sumatera Utara	45 474	27 780	73 254	3,20	1,95	5,15
Sumatera Barat	21 057	15 177	36 234	3,97	2,86	6,83
Riau	24 470	12 450	36 920	3,70	1,88	5,58
Jambi	12 650	5 235	17 885	3,61	1,50	5,11
Sumatera Selatan	22 953	9 968	32 920	2,79	1,21	4,00
Bengkulu	4 839	4 150	8 989	2,51	2,15	4,66
Lampung	25 324	9 145	34 469	3,06	1,11	4,17
Kep. Bangka Belitung	4 697	1 979	6 675	3,30	1,39	4,69
Kepulauan Riau	7 216	6 728	13 944	3,49	3,25	6,74
DKI Jakarta	24 144	60 901	85 045	2,33	5,88	8,22
Jawa Barat	98 671	563 860	662 531	2,06	11,78	13,84
Jawa Tengah	88 501	65 950	154 451	2,59	1,93	4,52
DI Yogyakarta	9 792	9 957	19 749	2,61	2,65	5,26
Jawa Timur	110 229	73 267	183 496	2,81	1,87	4,68
Banten	29 041	49 972	79 013	2,34	4,03	6,38
Bali	15 612	8 713	24 325	3,69	2,06	5,74
Nusa Tenggara Barat	14 041	6 487	20 528	2,84	1,31	4,15
Nusa Tenggara Timur	7 278	1 274	8 553	1,38	0,24	1,62
Kalimantan Barat	7 772	2 715	10 487	1,58	0,55	2,13
Kalimantan Tengah	7 116	44 478	51 594	2,75	17,16	19,91
Kalimantan Selatan	10 662	6 590	17 252	2,60	1,61	4,20
Kalimantan Timur	9 975	6 447	16 422	2,80	1,81	4,62
Kalimantan Utara	1 554	558	2 113	2,27	0,82	3,09
Sulawesi Utara	6 312	4 187	10 499	2,57	1,71	4,28
Sulawesi Tengah	6 556	4 668	11 224	2,22	1,58	3,80
Sulawesi Selatan	14 454	14 347	28 800	1,67	1,65	3,32
Sulawesi Tenggara	3 874	1 341	5 216	1,50	0,52	2,01
Gorontalo	3 135	1 647	4 782	2,69	1,42	4,11
Sulawesi Barat	2 236	633	2 869	1,69	0,48	2,17
Maluku	3 340	1 748	5 088	1,92	1,01	2,93
Maluku Utara	2 500	943	3 443	2,08	0,78	2,86
Papua Barat	2 011	1 033	3 044	2,21	1,14	3,35
Papua	6 554	1 462	8 016	2,02	0,45	2,47
Indonesia	671 068	1 040 241	1 711 309	2,57	3,98	6,55

Ket. : Data Susenas Maret 2017

3.10 Konsumsi Cabai

Cabai merupakan salah satu komoditas penting bagi perekonomian Indonesia. Cabai juga digunakan sebagai penyedap untuk berbagai produk makanan olahan seperti mie instant dan saos sambal dengan nilai produk yang cukup signifikan. Dari sisi harga, komoditas cabai sering terjadi gejolak harga yang cukup fluktuatif. Meskipun demikian, rata-rata produksi cabai tiap tahun meningkat cepat. Harga turun ketika musim panen dan sebaliknya.

Kenaikan harga cabai biasanya disebabkan oleh berkurangnya pasokan cabai dari produsen. Tingginya intensitas hujan di beberapa daerah menyebabkan banyak petani yang mengalami gagal panen, sehingga pasokan cabai berkurang. Kurangnya pasokan dalam memenuhi peningkatan kebutuhan cabai biasanya terjadi menjelang lebaran dan natal, sehingga mengakibatkan kenaikan harga tidak terhindarkan. Di sisi lain ada kebijakan dari pemerintah untuk tetap tidak akan melakukan impor. Selain harga cabai sering bergejolak secara tajam, disparitas harga cabai antar wilayah juga cukup tinggi. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang efektif dan efisien untuk mengurangi kedua masalah tersebut.

Tabel 3.20 Konsumsi Cabai Menurut Institusi Pengguna, 2014- 2017

Institusi	2014		2015		2017	
	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)	Total (ton)	Per Kapita (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rumah tangga	736 934	2,93	1 507 484	5,92	948 162	3,63
Hotel	12 052	0,05	8 552	0,03	2 853	0,01
Restoran dan Catering	15 089	0,06	4 999	0,01	16 867	0,06
Rumah makan dan PMM Lainnya	1 907 083	7,59	665 116	2,61	1 033 253	3,96
Industri Besar Sedang	24 648	0,1	5 154	0,02	238 648	0,91
Industri Mikro Kecil	8 456	0,03	19 411	0,08	40 525	0,16
Jasa Kesehatan	2 655	0,01	1 181	0,00	5 758	0,02
Jasa Lainnya	11 605	0,05	18 419	0,07		
Total	2 719 522	10,82	2 230 316	8,76	2 286 066	8,76

Catatan: PMM=Penyedia Makanan Minuman

Komoditas cabai yang banyak dikonsumsi penduduk Indonesia adalah cabai besar, cabai keriting dan cabai rawit. Produk yang dipasarkan biasanya dalam dua jenis warna, cabai merah dan cabai hijau. Konsumsi langsung masyarakat terhadap cabai dalam bentuk segar biasanya tidak dapat digantikan oleh

Tabel 3.21 Konsumsi Cabai Menurut Provinsi, 2017

Provinsi	Konsumsi per Tahun (ton)			Konsumsi per Kapita (kg)		
	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi	Di Dalam Rumah Tangga (Susenas)	Di Luar Rumah Tangga (VKBP)	Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	30 943	37 491	68 434	5,99	7,26	13,25
Sumatera Utara	86 003	68 326	154 329	6,05	4,80	10,85
Sumatera Barat	43 369	88 457	131 826	8,17	16,67	24,84
Riau	42 829	33 483	76 312	6,47	5,06	11,53
Jambi	25 186	14 624	39 810	7,19	4,18	11,37
Sumatera Selatan	37 447	26 091	63 538	4,54	3,17	7,71
Bengkulu	13 067	7 640	20 708	6,78	3,97	10,75
Lampung	43 356	22 392	65 748	5,24	2,71	7,95
Kep. Bangka Belitung	5 504	3 394	8 898	3,87	2,38	6,25
Kep. Riau	11 397	14 180	25 577	5,51	6,85	12,36
DKI Jakarta	51 373	106 490	157 862	4,96	10,29	15,25
Jawa Barat	136 012	539 451	675 463	2,84	11,27	14,11
Jawa Tengah	120 934	98 465	219 399	3,54	2,88	6,42
DI Yogyakarta	9 450	33 578	43 028	2,52	8,95	11,47
Jawa Timur	116 115	103 539	219 655	2,96	2,64	5,60
Banten	46 269	53 159	99 427	3,74	4,29	8,03
Bali	12 756	12 423	25 179	3,01	2,93	5,95
Nusa Tenggara Barat	11 584	11 322	22 906	2,34	2,29	4,64
Nusa Tenggara Timur	5 898	1 547	7 445	1,12	0,29	1,41
Kalimantan Barat	9 142	5 361	14 503	1,86	1,09	2,95
Kalimantan Tengah	5 682	11 579	17 261	2,19	4,47	6,66
Kalimantan Selatan	7 341	5 881	13 222	1,79	1,43	3,22
Kalimantan Timur	9 036	6 850	15 886	2,54	1,93	4,47
Kalimantan Utara	1 269	655	1 924	1,85	0,96	2,81
Sulawesi Utara	10 125	6 187	16 312	4,12	2,52	6,64
Sulawesi Tengah	8 824	4 267	13 091	2,99	1,44	4,43
Sulawesi Selatan	18 816	8 274	27 091	2,17	0,95	3,12
Sulawesi Tenggara	3 528	2 145	5 674	1,36	0,83	2,19
Gorontalo	4 205	1 970	6 176	3,61	1,69	5,31
Sulawesi Barat	2 863	996	3 859	2,16	0,75	2,91
Maluku	3 722	2 385	6 107	2,14	1,37	3,52
Maluku Utara	3 801	1 645	5 447	3,16	1,37	4,53
Papua Barat	1 869	1 502	3 371	2,05	1,65	3,70
Papua	8 445	2 154	10 599	2,60	0,66	3,26
Indonesia	948 162	1 337 904	2 286 066	3,63	5,12	8,76

Ket. : Data Susenas Maret 2017

hasil olahan, bahkan di beberapa daerah tertentu sangat fanatik dengan jenis tertentu. Menurut Tabel 3.20, total kebutuhan cabai mencapai sekitar 2,29 juta ton pada tahun 2017. Dibandingkan dengan tahun 2015, penggunaan cabai mengalami kenaikan sekitar 2,50 persen, dimana pada tahun 2015 hanya sebanyak 2,23 juta ton. Namun jika dilihat dari besarnya konsumsi perkapita pertahun menunjukkan nilai yang sama antara tahun 2015 dengan 2017 yang besarnya sekitar 8,76 kg per kapita per tahun.

Jika dilihat menurut penggunaannya pada tahun 2017, sekitar 45,20 persen pasokan cabai dikonsumsi untuk kebutuhan usaha rumah makan dan jasa penyedia makanan minuman lainnya dan sekitar 41,48 persen dikonsumsi di dalam rumah tangga. Hanya sekitar 12,21 persen cabai digunakan sebagai bahan baku di sektor industri, baik industri besar sedang maupun industri mikro kecil. Begitu juga menurut konsumsi per kapita, dimana usaha rumah makan dan penyedia makanan minuman lainnya mencapai 3,96 kg per kapita per tahun, sedangkan konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 3,63 kg per kapita per tahun. Penggunaan komoditas cabai untuk bahan baku pada usaha industri besar sedang (IBS) mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 238,6 ribu ton.

Sebagaimana komoditas lain, Provinsi Jawa Barat juga merupakan provinsi yang memiliki jumlah penggunaan cabai terbanyak dibandingkan provinsi lain, yaitu mencapai sekitar 675 ribu ton (Tabel 3.21). Selanjutnya dua provinsi yang memiliki konsumsi hampir sama yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah sekitar 219 ribu ton. Sementara kebutuhan akan cabai yang terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara, hanya sekitar 1,9 ribu ton, Papua Barat sebanyak 3,4 ribu ton, dan Sulawesi Barat sebesar 3,8 ribu ton. Jika dilihat konsumsi per kapita, tiga provinsi dengan konsumsi per kapita tertinggi adalah Sumatera Barat sekitar 24,84 kg, DKI Jakarta sebanyak 15,25 kg, dan Jawa Barat sebesar 14,11 kg per kapita per tahun.

4

KESIMPULAN

<https://www.pps.go.id>

Kajian Konsumsi Bahan Pokok dilakukan untuk menyajikan informasi yang akurat, rinci, dan tepat waktu mengenai tingkat konsumsi bahan makanan pokok seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur ayam atau telur bebek/itik, susu sapi segar, ikan segar, bawang merah, dan cabai pada level provinsi. Adanya keterbatasan data/informasi mengenai konsumsi bahan pokok yang diolah di luar rumah tangga melalui konsumsi makanan jadi hasil kegiatan Susenas, maka perlu dilakukan Kajian Konsumsi Bahan Pokok (VKBP). Kajian ini terutama bertujuan untuk mengetahui estimasi penggunaan atau konsumsi bahan pokok yang dilakukan di luar rumah tangga. Survei Konsumsi Bahan Pokok diselenggarakan sejak tahun 2014, 2015 dan 2017. Unit pendataan Survei Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017 meliputi hotel, restoran dan catering, rumah makan, warung makan dan penyedia makanan dan minuman lainnya, industri pengolahan, serta jasa kesehatan (rumah sakit).

Kajian Konsumsi Bahan Pokok tahun 2014, 2015, dan 2017 merupakan kelanjutan dari Kajian Konsumsi dan Cadangan Beras tahun 2011 serta Kajian Konsumsi Beras tahun 2012. Selain komoditas beras, dalam Survei Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017 ditambah lagi dengan 9 jenis bahan pokok lain, yaitu jagung, kedelai, daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur ayam dan telur bebek, susu sapi segar, ikan segar, bawang merah, dan cabai. Penambahan komoditas tersebut dilakukan karena tingkat ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh beras, tetapi juga dipengaruhi oleh komoditas lain.

Beberapa kesimpulan umum dari hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Total Konsumsi Beras nasional pada tahun 2017 mencapai 29,13 juta ton atau menurun sekitar 0,16 persen dibandingkan tahun 2015. Jika dihitung secara per kapita, maka konsumsi beras per tahun juga mengalami penurunan dari 114,61 kilogram menjadi 111,58 kilogram per kapita per tahun.
- Konsumsi beras dari tahun 2011 sampai dengan 2017 yang terbesar terjadi di dalam rumah tangga, diikuti oleh Rumah Makan dan Penyedia Makanan Minuman Lainnya, kemudian Industri Mikro Kecil. Namun jika dilihat dari pola konsumsinya, ada penurunan konsumsi beras per kapita yang diolah di dalam rumah tangga.
- Jika dilihat menurut provinsi, terdapat 3 provinsi dengan konsumsi beras terbanyak selama tahun 2017 yaitu Provinsi Jawa Barat sebesar 6,15 juta ton, Jawa Timur sebesar 4,27 juta ton, dan Jawa Tengah sebesar 3,69 juta ton. Berdasarkan konsumsi per kapita 2017, provinsi dengan konsumsi beras per kapita per tahun tertinggi juga berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 128,40 kg, Sulawesi Barat sebesar 126,40 kg, dan Aceh sebesar 126,28 kg.
- Total perkiraan konsumsi jagung tahun 2017 mencapai sebanyak 5,4 juta ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, konsumsi jagung mengalami peningkatan sekitar 20,95 persen. Secara rata-

rata, konsumsi jagung per kapita per tahun juga mengalami peningkatan dari 17,67 kg pada tahun 2015 menjadi 20,84 kg pada tahun 2017.

- Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki total penggunaan komoditas jagung terbanyak dibandingkan provinsi lain, yaitu mencapai sekitar 1,68 juta ton. Provinsi berikutnya dengan penggunaan komoditas jagung terbanyak selama tahun 2017 yaitu Provinsi Jawa Tengah hingga mencapai sebesar 1,25 juta ton dan Lampung yang mencapai sebanyak 689 ribu ton.
- Kebutuhan kedelai nasional selama tahun 2017 mencapai 3,1 juta ton biji kering, atau sekitar 11,89 kilogram per kapita per tahun. Dibandingkan tahun 2015, penggunaan kedelai meningkat sekitar 15,63 persen.
- Sekitar 96 persen penggunaan komoditas kedelai di dalam negeri digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan. Fenomena yang cukup menarik pada tahun 2017 adalah penggunaan kedelai pada industri mikro kecil (IMK) yang jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan industri besar sedang (IBS) hingga mencapai 2,66 juta ton untuk IBS sedangkan IMK hanya sebesar 0,33 juta ton.
- Total konsumsi daging sapi dan kerbau selama tahun 2017 mencapai sekitar 704,85 ribu ton, atau sekitar 2,70 kilogram per kapita per tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, konsumsi daging sapi dan kerbau meningkat sebesar 19,92 persen.
- Kebutuhan daging sapi dan kerbau sebagian besar digunakan oleh usaha rumah makan dan penyedia makanan dan minuman lainnya yang mencapai sekitar 72,06 persen dari total konsumsi daging sapi dan kerbau nasional selama tahun 2017. Sementara daging sapi dan kerbau yang diolah didalam rumah tangga hanya sekitar 17 persen.
- Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki total penggunaan daging sapi dan kerbau terbanyak dibandingkan provinsi lain yang mencapai sekitar 168,8 ribu ton. Provinsi berikutnya dengan konsumsi daging sapi dan kerbau terbanyak selama tahun 2017 yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 135,74 ribu ton dan Jawa Tengah sebesar 86,08 ribu ton.
- Berdasarkan konsumsi per kapita tahun 2017, provinsi dengan konsumsi daging sapi dan kerbau per kapita per tahun tertinggi juga berada di DKI Jakarta sebesar 6,41 kg. Selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat masing-masing sebesar 4,42 kg dan 3,53 kg.
- Secara total, penggunaan daging ayam selama tahun 2017 mencapai sekitar 3,9 juta ton, atau sekitar 15,07 kilogram per kapita per tahun. Dibandingkan dengan tahun 2015, terdapat peningkatan konsumsi daging ayam sekitar 16,59 persen.

- Penggunaan daging ayam sebagian besar dilakukan oleh usaha jasa penyedia makanan dan minuman, seperti restoran, catering, rumah makan, warung makan, dan penyedia makanan dan minuman lainnya yang mencapai sekitar 47,55 persen dari total penggunaan daging ayam di Indonesia. Konsumsi daging ayam di dalam rumah tangga mencapai sekitar 42,79 persen, sedangkan penggunaan daging ayam pada industri pengolahan dan jasa kesehatan masih dibawah 10 persen.
- Penggunaan telur ayam dan telur bebek/itik di Indonesia selama tahun 2017 mencapai sekitar 4,8 juta ton atau sekitar 18,44 kg per kapita per tahun. Sebagian besar dikonsumsi oleh rumah tangga sebagai bahan makanan yang mencapai sekitar 36,65 persen dari total penggunaan telur ayam dan telur bebek di dalam negeri. Penggunaan telur ayam dan telur bebek sebagai bahan baku pada industri pengolahan juga cukup tinggi hingga mencapai sekitar 30,80 persen, sedangkan sisanya sebagian besar digunakan oleh usaha jasa penyedia makanan dan minuman (restoran, catering, rumah makan, dan penyedia makanan dan minuman lainnya) yang mencapai sekitar 30,97 persen. Sementara itu daerah yang membutuhkan telur ayam dan telur bebek/itik terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah hingga mencapai sekitar 34,53 persen dari total kebutuhan telur nasional.
- Kebutuhan susu sapi segar di Indonesia selama tahun 2017 mencapai sekitar 1,26 juta ton atau sekitar 4,83 kg per kapita per tahun. Kebutuhan tersebut sebagian besar digunakan untuk bahan baku pada industri pengolahan yang jumlahnya mencapai 1,02 juta ton atau sekitar 80,86 persen dari total kebutuhan dalam negeri. Sisanya digunakan oleh rumah tangga dan usaha penyedia makanan dan minuman seperti restoran, rumah makan, dan sebagainya. Sementara itu daerah yang membutuhkan susu sapi segar terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah hingga mencapai sekitar 65,30 persen dari total kebutuhan nasional, kemudian Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.
- Penggunaan ikan segar dan biota air di Indonesia selama tahun 2017 mencapai sekitar 8,4 juta ton atau sekitar 32,36 kg per kapita per tahun. Sebagian besar dikonsumsi oleh rumah tangga sebagai bahan makanan yang mencapai sekitar 48,57 persen dari total kebutuhan nasional. Penggunaan ikan segar dan biota air oleh usaha jasa penyedia makanan dan minuman seperti hotel, restoran, catering, rumah makan serta usaha penyedia makanan dan minuman lainnya juga cukup tinggi hingga mencapai sekitar 19,97 persen, sedangkan sisanya digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan dan pengguna lainnya seperti rumah sakit. Sementara itu daerah yang membutuhkan ikan segar dan biota air terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah hingga mencapai sekitar 39,52 persen dari total kebutuhan nasional pada kedua provinsi tersebut.
- Total penggunaan bawang merah selama tahun 2017 mencapai sebesar 1,7 juta ton atau meningkat cukup tinggi sekitar 53,61 persen dibandingkan tahun 2015. Konsumsi bawang merah per kapita

menjadi sekitar 6,55 kg per tahun. Kebutuhan tersebut sebagian besar dikonsumsi oleh rumah tangga sebagai bumbu masak yang mencapai sekitar 39,21 persen dari total kebutuhan nasional. Penggunaan bawang merah oleh usaha jasa penyedia makanan dan minuman seperti hotel, restoran, catering, rumah makan serta usaha penyedia makanan dan minuman lainnya juga cukup tinggi hingga mencapai sekitar 32,22 persen, sedangkan sisanya digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan yang mencapai sekitar 28,51 persen dari kebutuhan nasional.

- Pada tahun 2017, tiga provinsi dengan konsumsi bawang merah terbesar adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Konsumsi bawang merah di Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar 662,53 ribu ton, Jawa Timur sekitar 183,50 ribu ton, dan Jawa Tengah sekitar 154,45 ribu ton.
- Total penggunaan cabai segar (cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit) selama tahun 2017 mencapai sebesar 2,29 juta ton atau meningkat sekitar 2,50 persen dibandingkan tahun 2015. Konsumsi cabai segar per kapita sekitar 8,76 kg per tahun atau sama dengan tahun 2015. Kebutuhan tersebut sebagian besar digunakan oleh usaha jasa penyedia makanan dan minuman seperti hotel, restoran, catering, rumah makan serta usaha penyedia makanan dan minuman lainnya yang mencapai sekitar 46,06 persen dari total kebutuhan nasional. Konsumsi cabai segar oleh rumah tangga sebagai bumbu masak juga cukup tinggi hingga mencapai sekitar 41,48 persen, sedangkan sisanya digunakan sebagai bahan baku pada industri pengolahan dan pengguna lainnya seperti rumah sakit.
- Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah konsumsi cabai terbanyak dibandingkan provinsi lainnya yang mencapai sekitar 675 ribu ton. Selanjutnya dua provinsi yang memiliki konsumsi terbanyak adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang jumlahnya hampir sama yaitu masing-masing sekitar 219 ribu ton.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan, 2009. Neraca Bahan Makanan Indonesia 2007-2008. Jakarta: Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.
- Badan Ketahanan Pangan, 2010. Neraca Bahan Makanan Indonesia 2008-2009. Jakarta: Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.
- Badan Ketahanan Pangan, 2011. Neraca Bahan Makanan Indonesia 2009-2010. Jakarta: Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.
- Badan Ketahanan Pangan, 2012. Neraca Bahan Makanan Indonesia 2010-2011. Jakarta: Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.
- Badan Ketahanan Pangan, 2013. Neraca Bahan Makanan Indonesia 2011-2012. Jakarta: Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.
- Badan Ketahanan Pangan, 2014. Neraca Bahan Makanan Indonesia 2012-2014. Jakarta: Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.
- Badan Ketahanan Pangan, 2015. Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Badan Ketahanan Pangan, 2016. Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Direktorat Pangan dan Pertanian, 2013. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Bidang Pangan dan Pertanian 2015-2019. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Warisno. 1998. Budidaya Jagung Hibrida. Penerbit Kanisius. Jakarta
- Ensiklopedia Kesehatan Wanita, dr Sarah Jarvis & Tim Dokter Wanita Kelas Dunia, Esensi, 2011
- Hadiana. 2011. Disparitas Harga Cabe. Jakarta. Asosiasi Agribisnis Cabe Indonesia (AACI).
- Muchtadi, D. 2009. Prinsip Teknologi Pengolahan Pangan Sumber Protein. Alfabeta : Bandung.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Berita resmi Statistik No. 80/11/Th. XVII, 3 November. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- http://www.farmingbusinessindonesia.com/fbi/detail_in_depth.php?id=260
- <http://finance.detik.com/read/2014/05/06/134735/2574622/4/ini-alasan-indonesia-harus-tetap-impor-bawang-merah>

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2016. Outlook Susu Komoditas Pertanian, Subsektor Peternakan 2016. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Badan Pusat Statistik, 2016. Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 2016. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://www.pbps.go.id>

LAMPIRAN 1. PENJELASAN RINGKAS SURVEI-SURVEI TERKAIT ESTIMASI KONSUMSI BAHAN POKOK 2017

1.1 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Umum

Kegiatan pengumpulan data sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara rutin oleh BPS diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data hasil survei dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat *monitoring* program pembangunan khususnya bidang sosial. Susenas pertama kali dilaksanakan pada tahun 1963, dengan mengumpulkan data konsumsi pengeluaran rumah tangga, dan selanjutnya susenas telah mengalami beberapa kali pengembangan.

Sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, pengumpulan data Susenas konsumsi pengeluaran rumah tangga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2015 pengumpulan data Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada Maret untuk pengumpulan data kor dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga dan September untuk pengumpulan data modul dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Target sampel Susenas Maret adalah 300.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Target sampel Susenas pada bulan September adalah sebanyak 75 000 rumah tangga.

Data hasil pencacahan Susenas Maret dapat disajikan untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sedangkan untuk data hasil Susenas September hanya dapat disajikan untuk tingkat nasional dan provinsi. Hasil pengumpulan data Kor Susenas 2017 dipublikasikan satu kali berdasarkan hasil Susenas Maret, sedangkan hasil pengumpulan data konsumsi/pengeluaran Susenas 2017 dipublikasikan dua kali berdasarkan hasil Susenas Maret dan September.

Data konsumsi/pengeluaran dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2017, jumlah komoditi makanan sebanyak 217 komoditi, lebih banyak dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebanyak 112 komoditi. Pengumpulan data kelompok makanan masih meliputi banyaknya komoditi yang dikonsumsi beserta nilai pengeluarannya. Pengumpulan data pada sebagian besar kelompok bukan makanan hanya mencakup nilai pengeluaran barang yang dikonsumsi, kecuali beberapa jenis barang tertentu juga dikumpulkan kuantitasnya, seperti listrik, air, gas, dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ruang Lingkup

Seperti dijelaskan sebelumnya, Susenas Maret 2017 mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh wilayah geografis Indonesia. Hasil Susenas Maret 2017 dapat disajikan baik pada tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Kerangka Sampel

Kerangka sampel induk atau *sampling frame* induk kegiatan Susenas, Sakernas, dan SUPAS 2015 adalah sekitar 180.000 blok sensus (25 persen populasi) yang ditarik secara *Probability Proportional to Size (PPS)* dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil SP2010. Kerangka sampel Susenas yang digunakan terdiri dari tiga yaitu:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2010.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar 25 persen blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya. 25 persen blok sensus ini disebut *sampling frame* induk.
3. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada individu diusahakan agar individu bersangkutan yang diwawancarai. Keterangan rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Referensi waktu survei yang digunakan adalah selama seminggu terakhir untuk konsumsi makanan, dan sebulan atau setahun terakhir untuk konsumsi bukan makanan.

1.2 Survei Konsumsi Bahan Pokok 2017

1.2.1 Kerangka sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari 3 macam yaitu:

1. Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah master kabupaten yang disertai dengan informasi jumlah usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, yang menggunakan bahan pokok tersebut, jumlah usaha jasa kesehatan, dan industri pengolahan.
2. Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah:
 - a. Perusahaan direktori, Usaha Menengah Besar (UMB) dari hasil pendataan usaha Sensus Ekonomi 2016-L2 bukan merupakan jaringan usaha penunjang dengan KBLI hotel berbintang, restoran, catering, jasa kesehatan dan industri pengolahan.
 - b. Usaha penyediaan makanan minuman dan IMK pengguna bahan pokok adalah master BS dari hasil pendataan usaha Sensus Ekonomi 2016-L2 yang berisi informasi muatan jumlah usaha penyediaan makanan minuman dan IMK.
3. Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga yaitu daftar rumah tangga yang mengusahakan penyediaan makanan dan minuman serta IMK dalam blok sensus terpilih.

1.2.2 Desain Sampling

Desain sampling yang diterapkan dalam Survei Konsumsi Bahan Pokok ini dibagi menjadi 3 tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, memilih 384 kabupaten sampel. Dilakukan secara PPS dengan size banyaknya usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, dan industri pengolahan dalam tiap kabupaten.
2. Tahap kedua, dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Untuk usaha UMB dilakukan pemilihan sampel secara sistematis pada kabupaten/kota tertentu.
 - b. Untuk usaha penyediaan makanan minuman dan IMK pengguna bahan pokok, tahap kedua adalah pemilihan blok sensus dengan cara PPS dengan size banyaknya usaha penyediaan makanan minuman dan IMK pada tiap blok sensus.
3. Tahap ketiga, memilih rumah tangga usaha penyediaan makanan minuman dan IMK pengguna bahan pokok hasil listing pada BS terpilih dengan cara sistematis sampling.

1.2.3 Metode Estimasi

Prosedur estimasi untuk survei konsumsi bahan pokok 2017 dibedakan menjadi dua yaitu (1) estimasi untuk perusahaan direktori yang meliputi, perusahaan penyedia akomodasi, restoran, rumah

sakit, catering, IBS dan (2) estimasi untuk perusahaan penyedia makanan minuman dan IMK pengguna bahan pokok.

a) Skema sampling untuk perusahaan penyedia akomodasi, restoran, rumah sakit, catering, dan IBS adalah sebagai berikut:

Tahap	Sampling Unit	Populasi	Sampel	Metode	Peluang	Fraksi
1	Kabupaten/kota	N	n	PPS	$\frac{X_i}{X}$	$n \frac{X_i}{X}$
2	Jenis Perusahaan h h= (1,...5) 1= penyedia akomodasi, 2= restoran, 3= rumah sakit, 4= perusahaan catering 5= IBS	Q_{hi}	q_{hi}	sistematik	$\frac{1}{Q_{hi}}$	$\frac{q_{hi}}{Q_{hi}}$

Overall sampling fraction untuk perusahaan penyedia akomodasi, restoran, rumah sakit, catering, dan IBS:

$$f_2 = n \frac{X_i}{X} \frac{q_{hi}}{Q_{hi}}$$

$$w_2 = \frac{1}{f_2}$$

Estimasi karakteristik untuk perusahaan penyedia akomodasi, restoran, rumah sakit, catering dan IBS:

$$\hat{Y}_{2h} = \frac{X}{n} \sum_i \frac{1}{X_i} \frac{Q_{hi}}{q_{hi}} \sum_{j=1}^{q_{hi}} y_{hij}$$

\hat{Y}_{2h} = total karakteristik Y pada perusahaan penyedia akomodasi, restoran, rumah sakit, catering dan IBS

X = jumlah usaha penyedia akomodasi dan makanan minuman, dan industri pengolahan hasil listing SE2016 di provinsi.

X_i = jumlah usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, dan industri pengolahan hasil listing SE2016 di kabupaten i.

Q_{hi} = jumlah populasi jenis usaha h di kabupaten i dari frame direktori

q_{hi} = jumlah sampel jenis usaha h di kabupaten i

y_{hij} = karakteristik y pada jenis usaha h di kabupaten i usaha ke-j

Estimasi karakteristik untuk perusahaan penyedia akomodasi, restoran, rumah sakit, catering dan IBS:

$$\hat{Y}_2 = \sum_{h=1}^5 \hat{Y}_{2h}$$

b) Skema sampling usaha penyedia makanan minuman dan IMK

Tahap	Sampling Unit	Populasi	Sampel	Metode	Peluang	Fraksi
1	Kabupaten/kota	N	n	PPS	$\frac{X_i}{X}$	$n \frac{X_i}{X}$
2	Blok sensus	M_i	m_i	PPS	$\frac{Z_{ij}}{X_i}$	$m_i \frac{Z_{ij}}{X_i}$
3	Usaha penyedia makanan minuman	L_{1ij}	l_{1ij}	sistematik	$\frac{1}{L_{1ij}}$	$\frac{l_{1ij}}{L_{1ij}}$
4	Usaha IMK	L_{2ij}	l_{2ij}	sistematik	$\frac{1}{L_{2ij}}$	$\frac{l_{2ij}}{L_{2ij}}$

Overall sampling fraction untuk penyedia makan minum:

$$f_{31} = n \frac{X_i}{X} m_i \frac{Z_{ij}}{X_i} \frac{l_{1ij}}{L_{1ij}}$$

$$w_{31} = \frac{1}{f_3}$$

Blok Sensus Survei Konsumsi Bahan Pokok diambil dari Blok Sensus Sensus Ekonomi 2016, oleh sebab itu penimbang dikalikan dengan penimbang Sensus Ekonomi 2016

Estimasi karakteristik untuk penyedia makanan minuman :

$$\hat{Y}_{31} = \frac{X}{n} \sum_i^{384} \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} \frac{1}{Z_{ij}} \frac{L_{1ij}}{l_{1ij}} \sum_{k=1}^{l_{1ij}} y_{1ijk}$$

\hat{Y}_{31} = total karakteristik Y pada usaha penyedia makan minum

X = jumlah usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, dan industri pengolahan hasil listing SE2016 di provinsi.

X_i = jumlah usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, dan industri pengolahan hasil listing SE2016 di kabupaten i.

M_i = jumlah populasi BS di kabupaten i.

m_i = jumlah sampel BS di kabupaten i.

Z_{ij} = jumlah usaha penyediaan akomodasi makan minum dan IMK yang menggunakan bahan pokok tersebut dari hasil listing SE2016 di kabupaten i blok sensus j

l_{1ij} = jumlah sampel usaha penyedia makan minum hasil listing VKBP2017 di kabupaten i blok sensus j

L_{1ij} = jumlah usaha penyedia makan minum hasil listing VKBP2017 di kabupaten i blok sensus j

y_{1ijk} = karakteristik y pada usaha penyedia makan minum di kabupaten i pada blok sensus j usaha ke-k.

Overall sampling fraction untuk IMK:

$$f_{32} = n \frac{X_i}{X} m_i \frac{Z_{ij}}{X_i} \frac{l_{2ij}}{L_{2ij}}$$

$$w_{32} = \frac{1}{f_{32}}$$

Estimasi karakteristik untuk penyedia makan minum:

$$\hat{Y}_{32} = \frac{X}{n} \sum_i^{384} \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} \frac{1}{Z_{ij}} \frac{L_{2ij}}{l_{2ij}} \sum_{k=1}^{l_{2ij}} y_{2ijk}$$

\hat{Y}_{32} = total karakteristik Y pada usaha penyedia makanan minuman.

- X = jumlah usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, dan industri pengolahan hasil listing SE2016 di provinsi.
- X_i = jumlah usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, dan industri pengolahan hasil listing SE2016 di kabupaten i.
- M_i = jumlah populasi BS di kabupaten i
- m_i = jumlah sampel BS di kabupaten i
- Z_{ij} = jumlah usaha penyediaan akomodasi makan minum dan IMK yang menggunakan bahan pokok tersebut dari hasil listing SE2016 di kabupaten i blok sensus j
- l_{2ij} = jumlah sampel usaha IMK hasil listing VKBP2017 di kabupaten i blok sensus j
- L_{2ij} = jumlah usaha IMK hasil listing VKBP2017 di kabupaten i blok sensus j
- y_{2ijk} = karakteristik y pada usaha IMK j di kabupaten i pada blok sensus j usaha ke-k

Adjustment untuk non respon

Pada pelaksanaannya, dalam setiap survei selalu ada non respon, sehingga *desain weight* yang di buat harus dilakukan penyesuaian terhadap non respon tersebut. Penyesuaian dilakukan sebagai berikut:

1. Non respon Blok sensus

$$w_i^{(r)} = w_i \frac{1}{p_{BS}}$$

2. Non respon usaha di blok sensus

$$w_i^{(r)} = w_i \frac{1}{p_{BS}} \frac{1}{p_{usaha}}$$

p_{BS} : respon rate blok sensus

p_{usaha} : respon rate usaha di blok sensus

Trimming of weight

Untuk mengatasi varians estimasi yang besar, yang disebabkan adanya nilai *design weight* yang terlalu besar, maka harus dilakukan *trimming of weight*, namun hal ini juga akan menyebabkan bias estimator. Dalam beberapa kasus, mereduksi varians estimasi dengan *trimmed weight* dapat lebih mengimbangi bias yang terjadi, sehingga tetapi dapat mereduksi *mean-square error* (MSE) estimator

survei. Dalam prakteknya, melakukan *trimming of weight* hanya dibenarkan apabila dapat diyakinkan bahwa bias yang terjadi akibat penggunaan *trimmed weight* (sebagai tandingan *design weight/original weight*) memiliki sedikit dampak pada MSE total dibandingkan dengan reduksi varians hasil *trimming of weight*.

Trimmed weight untuk Survei Konsumsi Bahan Pokok dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. *Trimmed weight* untuk usaha ke-*i* dilakukan dengan cara:

$$W_{i(T)} = \begin{cases} W_i & \text{jk } W_i < (3 \cdot IQR \cdot W_i) \\ 3 \cdot IQR \cdot W_i & \text{jk } W_i \geq (3 \cdot IQR \cdot W_i) \end{cases}$$

2. *Trimmed weight* untuk blok sensus ke-*i* dilakukan dengan cara:

$$W_{i(T)} = \begin{cases} W_i & \text{jk } W_i < (3 \cdot IQR \cdot W_i) \\ 3 \cdot IQR \cdot W_i & \text{jk } W_i \geq (3 \cdot IQR \cdot W_i) \end{cases}$$

Selanjutnya *trimmed weight* disesuaikan dengan faktor koreksi F_T yang merupakan rasio jumlah *original weight* terhadap jumlah *trimmed weight*.

$$F_T = \frac{\sum_i W_i}{\sum_i W_{i(T)}}$$

sehingga diperoleh *adjusted trimmed weight* sebagai berikut:

$$W_{i(T)}^* = F_T \times W_{i(T)}$$

Prosedur estimasi setelah dilakukan *adjusted trimmed weight*

1. Estimasi karakteristik pada perusahaan penyedia akomodasi, restoran, rumah sakit, catering, dan IBS

$$\hat{Y}_{2h} = \sum_i \sum_{j=1}^{qhi} W_{i(T)}^2 y_{hij}$$

2. Estimasi karakteristik pada blok sensus untuk usaha penyediaan makanan minuman dan IMK

a. usaha penyediaan makanan minuman

$$\hat{Y}_{31} = \sum_i \sum_{j=1}^{qhi} \sum_{k=1}^{l_{ij}} W_{i(T)}^3 y_{1ijk}$$

b. usaha penyediaan makanan minuman

$$\hat{Y}_{32} = \sum_i^{384} \sum_{j=1}^{qhi} \sum_{k=1}^{l_{2ij}} W_{i(T)}^3 y_{ijk}$$

c. usaha penyediaan makanan minuman dan IMK

$$\hat{Y}_3 = \hat{Y}_{31} + \hat{Y}_{32}$$

3. Estimasi total karakteristik

$$\hat{Y} = \hat{Y}_1 + \hat{Y}_2 + \hat{Y}_3$$

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN 2: PENGHITUNGAN STANDAR ERROR

**Lampiran 2.1 Estimasi Konsumsi Bahan Pokok per Kapita di Luar Rumah Tangga dan RSE Nasional
Hasil Survei Konsumsi Bahan Pokok Tahun 2017**

Komoditas	Total Estimasi	Total SE	Total Deff	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
					Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Beras	29,97	2,72	0,93	9,08	24,64	35,31	34.831
Jagung	19,35	6,86	0,17	35,46	5,90	32,79	9.604
Kedelai	11,84	1,05	0,57	8,89	9,78	13,90	3.958
Daging sapi dan kerbau	2,24	0,08	0,33	3,73	2,08	2,40	13.680
Daging ayam	8,62	0,77	0,14	8,93	7,11	10,13	28.086
Telur ayam ras dan telur bebek	11,68	4,88	6,85	41,75	2,12	21,24	35.313
Susu sapi segar	4,53	2,93	0,17	64,71	-1,21	10,27	918
Ikan segar	16,64	2,41	0,12	14,46	11,92	21,36	20.635
Bawang merah	3,98	1,25	0,09	31,41	1,53	6,44	41.048
Cabai	5,12	0,78	0,21	15,21	3,60	6,65	45.124

Lampiran 2.2 Estimasi Konsumsi Bahan Pokok per Kapita di Luar Rumah Tangga dan RSE menurut Provinsi Hasil Survei Konsumsi Bahan Pokok Tahun 2017

A. Komoditas Beras

Provinsi	Total Estimasi	Total SE	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
				Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	34,17	5,29	15,47	23,81	44,53	777
Sumatera Utara	22,22	4,09	18,41	14,20	30,25	1.387
Sumatera Barat	34,32	10,37	30,21	14,00	54,63	1.199
Riau	14,31	1,67	11,71	11,02	17,59	957
Jambi	11,84	0,83	7,03	10,21	13,47	773
Sumatera Selatan	14,22	2,73	19,23	8,86	19,57	876
Bengkulu	9,42	0,87	9,21	7,72	11,12	548
Lampung	9,48	0,86	9,10	7,79	11,17	1.068
Bangka Belitung	21,26	5,32	25,00	10,84	31,68	420
Kepulauan Riau	25,73	3,51	13,63	18,85	32,60	665
DKI Jakarta	53,27	6,92	12,99	39,71	66,84	1.857
Jawa Barat	45,61	13,98	30,65	18,21	73,02	2.876
Jawa Tengah	35,52	5,84	16,43	24,08	46,96	2.801
DI Yogyakarta	42,14	3,40	8,06	35,48	48,80	1.248
Jawa Timur	32,56	1,39	4,26	29,84	35,28	3.037
Banten	20,74	2,20	10,62	16,42	25,06	1.461
Bali	31,12	2,71	8,71	25,80	36,43	1.313
Nusa Tenggara Barat	21,60	2,41	11,17	16,87	26,34	940
Nusa Tenggara Timur	12,40	2,74	22,12	7,03	17,78	561
Kalimantan Barat	10,32	2,17	21,04	6,07	14,58	922
Kalimantan Tengah	14,67	3,02	20,62	8,74	20,60	610
Kalimantan Selatan	28,81	3,30	11,44	22,35	35,27	974
Kalimantan Timur	21,17	2,19	10,35	16,87	25,46	821
Kalimantan Utara	13,12	3,69	28,11	5,89	20,34	361
Sulawesi Utara	17,57	1,14	6,47	15,34	19,80	892
Sulawesi Tengah	23,90	4,69	19,61	14,72	33,09	701
Sulawesi Selatan	16,05	2,44	15,19	11,27	20,82	1.124
Sulawesi Tenggara	20,35	3,51	17,27	13,46	27,24	674
Gorontalo	24,36	4,63	19,02	15,28	33,44	672
Sulawesi Barat	19,21	3,14	16,33	13,06	25,36	529
Maluku	33,86	5,04	14,89	23,98	43,74	529
Maluku Utara	15,67	2,51	15,99	10,76	20,58	419
Papua Barat	22,14	4,05	18,27	14,21	30,07	370
Papua	7,06	0,97	13,71	5,16	8,96	469

B. Komoditas Jagung

Provinsi	Total Estimasi	Total SE	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
				Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,41	0,13	31,31	0,16	0,66	219
Sumatera Utara	18,87	18,07	95,79	-16,55	54,29	313
Sumatera Barat	23,42	21,75	92,88	-19,21	66,05	160
Riau	0,24	0,07	30,02	0,10	0,38	126
Jambi	0,54	0,29	53,95	-0,03	1,11	101
Sumatera Selatan	0,60	0,28	47,09	0,05	1,16	229
Bengkulu	3,21	0,99	30,92	1,26	5,15	230
Lampung	82,90	82,43	99,44	-78,67	244,46	161
Bangka Belitung	0,07	0,02	26,59	0,03	0,11	85
Kepulauan Riau	0,26	0,08	29,04	0,11	0,41	165
DKI Jakarta	9,79	8,36	85,42	-6,60	26,18	716
Jawa Barat	34,73	30,20	86,96	-24,46	93,92	831
Jawa Tengah	35,97	19,70	54,77	-2,64	74,59	745
DI Yogyakarta	1,41	0,36	25,23	0,71	2,10	386
Jawa Timur	12,89	5,93	45,99	1,27	24,50	934
Banten	4,01	2,54	63,34	-0,97	8,99	315
Bali	1,29	0,28	21,51	0,75	1,84	464
Nusa Tenggara Barat	0,44	0,09	21,22	0,26	0,63	220
Nusa Tenggara Timur	1,24	0,28	22,78	0,69	1,80	189
Kalimantan Barat	1,25	0,73	58,61	-0,19	2,69	244
Kalimantan Tengah	1,77	1,52	85,88	-1,21	4,75	152
Kalimantan Selatan	50,22	49,69	98,94	-47,17	147,62	283
Kalimantan Timur	1,15	0,54	46,86	0,09	2,20	299
Kalimantan Utara	0,13	0,04	28,07	0,06	0,19	46
Sulawesi Utara	0,85	0,11	12,39	0,64	1,06	359
Sulawesi Tengah	2,82	0,64	22,57	1,57	4,06	350
Sulawesi Selatan	17,06	15,67	91,86	-13,66	47,78	409
Sulawesi Tenggara	1,06	0,27	25,46	0,53	1,59	239
Gorontalo	1,52	0,29	19,09	0,95	2,09	143
Sulawesi Barat	0,27	0,07	25,94	0,13	0,41	120
Maluku	0,71	0,22	30,84	0,28	1,14	93
Maluku Utara	0,20	0,06	29,79	0,08	0,31	54
Papua Barat	0,88	0,42	47,75	0,06	1,70	95
Papua	0,14	0,03	18,65	0,09	0,19	129

C. Komoditas Kedelai

Provinsi	Total Estimasi	Total SE	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
				Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,07	0,70	33,59	0,71	3,44	53
Sumatera Utara	3,07	0,61	19,75	1,88	4,26	100
Sumatera Barat	8,52	4,42	51,92	-0,15	17,19	48
Riau	18,07	5,07	28,07	8,13	28,01	81
Jambi	7,86	3,67	46,74	0,66	15,05	73
Sumatera Selatan	4,77	1,18	24,81	2,45	7,09	90
Bengkulu	15,55	4,62	29,70	6,50	24,60	58
Lampung	6,26	0,97	15,44	4,36	8,15	130
Bangka Belitung	9,53	4,23	44,40	1,24	17,83	70
Kepulauan Riau	12,21	3,60	29,53	5,14	19,27	89
DKI Jakarta	20,85	6,39	30,65	8,32	33,37	397
Jawa Barat	16,38	4,63	28,25	7,31	25,46	795
Jawa Tengah	16,73	2,89	17,29	11,06	22,40	382
DI Yogyakarta	21,60	4,19	19,39	13,39	29,81	154
Jawa Timur	11,17	1,83	16,35	7,59	14,75	439
Banten	11,24	4,04	35,97	3,31	19,17	182
Bali	7,99	2,90	36,32	2,30	13,68	131
Nusa Tenggara Barat	6,83	1,79	26,18	3,32	10,33	155
Nusa Tenggara Timur	13,12	5,84	44,51	1,67	24,57	34
Kalimantan Barat	2,57	0,60	23,46	1,39	3,75	77
Kalimantan Tengah	7,30	2,15	29,50	3,08	11,51	48
Kalimantan Selatan	7,38	2,20	29,87	3,06	11,70	52
Kalimantan Timur	11,54	2,33	20,19	6,97	16,11	87
Kalimantan Utara	15,91	8,72	54,84	-1,19	33,00	19
Sulawesi Utara	2,47	1,17	47,28	0,18	4,77	19
Sulawesi Tengah	3,88	1,96	50,35	0,05	7,72	14
Sulawesi Selatan	14,95	5,82	38,93	3,54	26,36	51
Sulawesi Tenggara	3,81	1,90	49,86	0,09	7,53	17
Gorontalo	1,25	0,95	76,31	-0,62	3,11	8
Sulawesi Barat	10,67	6,77	63,49	-2,61	23,95	24
Maluku	4,08	2,20	54,07	-0,24	8,39	18
Maluku Utara	3,53	1,56	44,16	0,48	6,59	8
Papua Barat	7,59	2,92	38,54	1,86	13,32	18
Papua	3,96	1,18	29,75	1,65	6,27	37

D. Komoditas Daging Sapi dan Kerbau

Provinsi	Total Estimasi	Total SE	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
				Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,83	0,12	14,32	0,60	1,06	266
Sumatera Utara	0,54	0,07	11,98	0,42	0,67	412
Sumatera Barat	2,59	0,28	10,80	2,04	3,14	475
Riau	0,95	0,14	14,49	0,68	1,22	307
Jambi	1,21	0,16	13,12	0,90	1,53	287
Sumatera Selatan	1,18	0,15	12,81	0,88	1,47	393
Bengkulu	1,11	0,15	13,79	0,81	1,41	177
Lampung	2,51	0,67	26,50	1,21	3,82	406
Bangka Belitung	1,84	0,30	16,53	1,24	2,43	219
Kepulauan Riau	1,39	0,22	15,99	0,96	1,83	264
DKI Jakarta	4,91	0,55	11,25	3,83	6,00	752
Jawa Barat	2,92	0,32	10,81	2,30	3,54	1.338
Jawa Tengah	2,31	0,26	11,44	1,79	2,82	1.163
DI Yogyakarta	2,66	0,52	19,64	1,64	3,68	400
Jawa Timur	2,77	0,20	7,36	2,37	3,17	1.521
Banten	2,70	0,35	13,01	2,01	3,39	596
Bali	2,18	1,01	46,44	0,20	4,17	354
Nusa Tenggara Barat	3,79	0,37	9,89	3,05	4,52	608
Nusa Tenggara Timur	0,85	0,10	11,22	0,66	1,04	319
Kalimantan Barat	0,81	0,12	15,32	0,57	1,05	427
Kalimantan Tengah	1,78	0,33	18,50	1,13	2,42	215
Kalimantan Selatan	1,44	0,15	10,73	1,13	1,74	361
Kalimantan Timur	2,39	0,32	13,49	1,76	3,03	395
Kalimantan Utara	1,48	0,30	20,56	0,89	2,08	140
Sulawesi Utara	0,80	0,12	15,50	0,56	1,05	226
Sulawesi Tengah	0,90	0,18	19,49	0,56	1,24	175
Sulawesi Selatan	1,97	0,26	12,97	1,47	2,47	449
Sulawesi Tenggara	0,91	0,13	14,03	0,66	1,16	203
Gorontalo	1,09	0,15	13,68	0,80	1,38	201
Sulawesi Barat	0,79	0,14	17,34	0,52	1,06	126
Maluku	0,60	0,11	18,18	0,39	0,82	125
Maluku Utara	1,03	0,26	25,17	0,52	1,54	101
Papua Barat	1,72	0,26	14,98	1,21	2,22	108
Papua	0,64	0,11	17,46	0,42	0,86	171

E. Komoditas Daging Ayam

Provinsi	Total Estimasi	Total SE	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
				Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7,64	0,61	8,00	6,44	8,83	774
Sumatera Utara	6,85	1,34	19,53	4,23	9,48	1.249
Sumatera Barat	10,37	1,82	17,59	6,79	13,94	707
Riau	7,32	0,62	8,46	6,10	8,53	812
Jambi	5,44	0,42	7,65	4,62	6,25	641
Sumatera Selatan	5,55	0,54	9,65	4,50	6,59	734
Bengkulu	4,41	0,40	9,06	3,62	5,19	503
Lampung	4,83	0,91	18,77	3,05	6,61	816
Bangka Belitung	7,91	1,00	12,65	5,95	9,87	416
Kepulauan Riau	11,17	1,40	12,50	8,43	13,90	566
DKI Jakarta	18,05	1,60	8,88	14,91	21,19	1.519
Jawa Barat	8,32	0,53	6,33	7,29	9,36	2.487
Jawa Tengah	8,68	1,77	20,35	5,22	12,14	2.532
DI Yogyakarta	18,38	1,97	10,74	14,51	22,25	1.061
Jawa Timur	11,77	4,74	40,29	2,48	21,07	2.512
Banten	8,05	1,67	20,70	4,79	11,32	1.146
Bali	10,93	1,12	10,29	8,72	13,13	1.062
Nusa Tenggara Barat	6,97	1,28	18,40	4,46	9,48	852
Nusa Tenggara Timur	0,99	0,10	10,33	0,79	1,19	369
Kalimantan Barat	3,88	0,32	8,15	3,26	4,50	705
Kalimantan Tengah	10,60	2,58	24,37	5,54	15,67	692
Kalimantan Selatan	8,78	0,67	7,64	7,46	10,09	934
Kalimantan Timur	13,64	2,06	15,07	9,61	17,67	807
Kalimantan Utara	4,89	0,51	10,36	3,89	5,88	331
Sulawesi Utara	6,31	0,88	13,91	4,59	8,03	476
Sulawesi Tengah	4,19	1,03	24,50	2,18	6,20	355
Sulawesi Selatan	6,65	1,06	15,90	4,58	8,73	839
Sulawesi Tenggara	2,88	0,29	10,06	2,32	3,45	356
Gorontalo	3,47	0,40	11,44	2,70	4,25	321
Sulawesi Barat	4,17	0,64	15,27	2,92	5,42	310
Maluku	3,89	0,55	14,15	2,81	4,96	277
Maluku Utara	3,55	0,54	15,31	2,48	4,61	218
Papua Barat	5,64	0,68	12,08	4,30	6,97	259
Papua	3,21	0,36	11,29	2,50	3,92	448

F. Komoditas Telur Ayam Ras dan Telur Bebek/Itik

Provinsi	Total Estimasi	Total SE	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
				Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6,34	0,69	10,91	4,99	7,70	1.218
Sumatera Utara	7,89	1,13	14,32	5,68	10,11	1.695
Sumatera Barat	18,21	12,01	65,95	-5,33	41,75	1.262
Riau	3,62	0,24	6,72	3,15	4,10	1.051
Jambi	3,61	0,34	9,48	2,94	4,28	760
Sumatera Selatan	3,45	0,35	10,12	2,77	4,14	1.208
Bengkulu	3,61	0,60	16,63	2,43	4,78	593
Lampung	2,50	0,21	8,56	2,08	2,92	908
Bangka Belitung	7,08	0,87	12,32	5,37	8,79	603
Kepulauan Riau	11,43	2,82	24,65	5,91	16,96	729
DKI Jakarta	15,73	1,21	7,68	13,36	18,10	1.780
Jawa Barat	5,72	0,37	6,51	4,99	6,45	2.585
Jawa Tengah	42,40	37,06	87,42	-30,25	115,04	2.406
DI Yogyakarta	24,37	14,59	59,88	-4,23	52,98	1.095
Jawa Timur	4,37	0,25	5,75	3,88	4,87	2.799
Banten	9,18	3,42	37,23	2,48	15,87	1.321
Bali	5,81	0,38	6,58	5,06	6,56	1.027
Nusa Tenggara Barat	5,43	1,30	23,88	2,89	7,97	858
Nusa Tenggara Timur	1,17	0,16	13,45	0,86	1,48	577
Kalimantan Barat	4,23	0,43	10,06	3,40	5,07	977
Kalimantan Tengah	20,44	8,79	43,02	3,21	37,67	796
Kalimantan Selatan	6,27	0,56	8,88	5,18	7,36	1.150
Kalimantan Timur	6,81	0,58	8,47	5,68	7,94	953
Kalimantan Utara	19,25	14,98	77,82	-10,11	48,62	387
Sulawesi Utara	5,78	0,47	8,06	4,86	6,69	833
Sulawesi Tengah	7,41	3,45	46,54	0,65	14,17	751
Sulawesi Selatan	16,50	7,42	44,96	1,96	31,05	1.234
Sulawesi Tenggara	5,03	0,71	14,22	3,62	6,43	724
Gorontalo	5,56	0,43	7,80	4,71	6,40	633
Sulawesi Barat	2,43	0,22	9,17	1,99	2,86	518
Maluku	3,59	0,32	8,86	2,97	4,22	492
Maluku Utara	3,33	0,35	10,47	2,65	4,01	464
Papua Barat	4,91	0,75	15,21	3,45	6,37	393
Papua	2,30	0,33	14,16	1,66	2,94	533

G. Komoditas Susu Sapi Segar

Provinsi	Total Estimasi	Total SE	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
				Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,01	0,00	72,99	-0,00	0,01	4
Sumatera Utara	0,05	0,01	30,22	0,02	0,07	26
Sumatera Barat	0,14	0,08	61,39	-0,03	0,30	15
Riau	0,02	0,02	94,98	-0,02	0,06	7
Jambi	0,03	0,02	59,14	-0,00	0,07	5
Sumatera Selatan	0,07	0,06	81,39	-0,04	0,18	19
Bengkulu	0,00	0,00	66,77	-0,00	0,01	3
Lampung	0,77	0,70	91,01	-0,60	2,13	28
Bangka Belitung	0,19	0,13	69,25	-0,07	0,44	9
Kepulauan Riau	0,14	0,12	80,61	-0,08	0,37	21
DKI Jakarta	3,08	1,30	42,35	0,52	5,63	121
Jawa Barat	4,47	1,96	43,81	0,63	8,31	164
Jawa Tengah	23,83	22,18	93,10	-19,65	67,31	111
DI Yogyakarta	4,00	2,24	56,06	-0,40	8,40	62
Jawa Timur	2,25	0,98	43,49	0,33	4,17	130
Banten	0,47	0,24	51,17	-0,00	0,94	49
Bali	0,29	0,09	31,50	0,11	0,47	51
Nusa Tenggara Barat	0,02	0,01	69,57	-0,01	0,04	10
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	0,01	0,00	43,12	0,00	0,01	9
Kalimantan Tengah	0,02	0,02	94,18	-0,02	0,06	2
Kalimantan Selatan	0,03	0,02	51,48	-0,00	0,07	7
Kalimantan Timur	0,05	0,02	47,14	0,00	0,10	19
Kalimantan Utara	0,01	0,01	79,24	-0,00	0,02	2
Sulawesi Utara	0,05	0,02	45,46	0,01	0,09	9
Sulawesi Tengah	0,05	0,03	56,91	-0,01	0,10	6
Sulawesi Selatan	0,10	0,05	55,88	-0,01	0,20	16
Sulawesi Tenggara	0,05	0,04	76,57	-0,03	0,13	3
Gorontalo	0,08	0,06	73,45	-0,04	0,20	4
Sulawesi Barat	0,01	0,01	72,75	-0,00	0,02	2
Maluku	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	0,01	0,00	72,99	-0,00	0,01	2
Papua	0,00	0,00	84,24	-0,00	0,01	2

H. Komoditas Ikan Segar

Provinsi	Total Estimasi	Total SE	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
				Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6,74	0,70	10,42	5,36	8,12	602
Sumatera Utara	20,28	8,02	39,54	4,57	35,99	857
Sumatera Barat	40,84	34,01	83,27	-25,82	107,51	446
Riau	5,83	1,25	21,40	3,38	8,27	480
Jambi	9,85	5,11	51,87	-0,16	19,86	378
Sumatera Selatan	4,56	0,37	8,06	3,84	5,29	842
Bengkulu	4,14	1,08	26,01	2,03	6,25	278
Lampung	2,95	0,34	11,47	2,28	3,61	564
Bangka Belitung	9,89	1,43	14,46	7,09	12,69	476
Kepulauan Riau	10,25	1,58	15,36	7,17	13,34	552
DKI Jakarta	10,28	1,64	15,92	7,08	13,49	991
Jawa Barat	6,54	1,29	19,67	4,02	9,06	1.426
Jawa Tengah	41,09	12,56	30,57	16,47	65,71	1.357
DI Yogyakarta	8,37	1,25	14,88	5,93	10,81	555
Jawa Timur	30,87	10,14	32,84	11,00	50,75	1.345
Banten	3,47	0,44	12,81	2,60	4,34	792
Bali	18,63	6,51	34,94	5,87	31,38	560
Nusa Tenggara Barat	4,00	1,09	27,22	1,87	6,14	467
Nusa Tenggara Timur	4,90	2,43	49,56	0,14	9,66	416
Kalimantan Barat	2,97	0,53	17,83	1,93	4,01	477
Kalimantan Tengah	4,56	0,51	11,27	3,55	5,56	416
Kalimantan Selatan	7,68	1,25	16,32	5,22	10,13	630
Kalimantan Timur	7,80	1,38	17,69	5,10	10,50	517
Kalimantan Utara	16,92	6,01	35,50	5,15	28,70	187
Sulawesi Utara	41,68	15,63	37,49	11,05	72,31	760
Sulawesi Tengah	9,77	2,22	22,74	5,42	14,13	717
Sulawesi Selatan	4,46	0,67	15,01	3,15	5,78	556
Sulawesi Tenggara	14,02	3,42	24,41	7,31	20,73	453
Gorontalo	13,16	3,09	23,49	7,10	19,22	629
Sulawesi Barat	4,18	1,52	36,40	1,20	7,16	340
Maluku	17,31	4,24	24,47	9,01	25,62	481
Maluku Utara	7,46	1,48	19,85	4,56	10,36	370
Papua Barat	25,68	7,44	28,97	11,10	40,26	362
Papua	1,54	0,22	14,28	1,11	1,97	356

I. Komoditas Bawang Merah

Provinsi	Total Estimasi	Total SE	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
				Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2,80	0,19	6,85	2,42	3,17	1.341
Sumatera Utara	1,95	0,17	8,69	1,62	2,29	2.029
Sumatera Barat	2,86	0,15	5,16	2,57	3,15	1.568
Riau	1,88	0,16	8,49	1,57	2,19	1.232
Jambi	1,50	0,10	6,74	1,30	1,69	943
Sumatera Selatan	1,21	0,12	9,94	0,97	1,45	1.237
Bengkulu	2,15	0,87	40,55	0,44	3,87	753
Lampung	1,11	0,07	6,17	0,97	1,24	1.256
Bangka Belitung	1,39	0,12	8,51	1,16	1,62	617
Kepulauan Riau	3,25	0,32	9,78	2,63	3,88	780
DKI Jakarta	5,88	0,81	13,80	4,29	7,48	1.898
Jawa Barat	11,78	6,77	57,50	-1,50	25,05	3.352
Jawa Tengah	1,93	0,17	9,06	1,59	2,27	3.187
DI Yogyakarta	2,65	0,24	8,90	2,19	3,12	1.243
Jawa Timur	1,87	0,19	10,25	1,49	2,24	3.292
Banten	4,03	1,69	41,79	0,73	7,34	1.661
Bali	2,06	0,16	7,77	1,74	2,37	1.212
Nusa Tenggara Barat	1,31	0,14	10,93	1,03	1,59	1.055
Nusa Tenggara Timur	0,24	0,02	9,12	0,20	0,29	622
Kalimantan Barat	0,55	0,04	6,36	0,48	0,62	1.034
Kalimantan Tengah	17,16	12,05	70,22	-6,46	40,79	777
Kalimantan Selatan	1,61	0,15	9,38	1,31	1,90	1.101
Kalimantan Timur	1,81	0,18	10,09	1,45	2,17	927
Kalimantan Utara	0,82	0,08	10,39	0,65	0,98	450
Sulawesi Utara	1,71	0,11	6,70	1,48	1,93	1.010
Sulawesi Tengah	1,58	0,26	16,70	1,06	2,10	973
Sulawesi Selatan	1,65	0,75	45,20	0,19	3,12	1.215
Sulawesi Tenggara	0,52	0,04	6,79	0,45	0,59	812
Gorontalo	1,42	0,11	7,79	1,20	1,63	744
Sulawesi Barat	0,48	0,04	8,02	0,40	0,55	560
Maluku	1,01	0,09	8,86	0,83	1,18	646
Maluku Utara	0,78	0,10	13,10	0,58	0,98	511
Papua Barat	1,14	0,11	9,81	0,92	1,35	458
Papua	0,45	0,09	21,04	0,26	0,64	552

J. Komoditas Cabai

Provinsi	Total Estimasi	Total SE	Total RSE	Confidence Interval		Jumlah Observasi
				Lower	Upper	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	7,26	0,66	9,05	5,97	8,54	1.350
Sumatera Utara	4,80	0,42	8,81	3,97	5,63	2.081
Sumatera Barat	16,67	1,29	7,73	14,14	19,20	1.606
Riau	5,06	0,54	10,63	4,01	6,11	1.257
Jambi	4,18	0,40	9,49	3,40	4,95	980
Sumatera Selatan	3,17	0,37	11,54	2,45	3,88	1.399
Bengkulu	3,97	0,46	11,56	3,07	4,86	836
Lampung	2,71	0,26	9,77	2,19	3,23	1.396
Bangka Belitung	2,38	0,61	25,77	1,18	3,59	713
Kepulauan Riau	6,85	1,05	15,29	4,80	8,91	811
DKI Jakarta	10,29	0,94	9,09	8,46	12,12	2.222
Jawa Barat	11,27	4,22	37,42	3,00	19,53	3.728
Jawa Tengah	2,88	0,13	4,48	2,63	3,13	3.503
DI Yogyakarta	8,95	4,27	47,72	0,58	17,32	1.350
Jawa Timur	2,64	0,29	11,01	2,07	3,21	3.913
Banten	4,29	0,48	11,24	3,35	5,24	1.895
Bali	2,93	0,17	5,89	2,59	3,27	1.364
Nusa Tenggara Barat	2,29	0,33	14,35	1,65	2,94	1.222
Nusa Tenggara Timur	0,29	0,02	6,94	0,25	0,33	752
Kalimantan Barat	1,09	0,15	13,34	0,81	1,38	1.125
Kalimantan Tengah	4,47	1,49	33,40	1,54	7,39	868
Kalimantan Selatan	1,43	0,12	8,46	1,20	1,67	1.231
Kalimantan Timur	1,93	0,18	9,13	1,58	2,27	1.013
Kalimantan Utara	0,96	0,09	9,71	0,77	1,14	520
Sulawesi Utara	2,52	0,17	6,59	2,19	2,85	1.074
Sulawesi Tengah	1,44	0,09	5,91	1,28	1,61	1.017
Sulawesi Selatan	0,95	0,06	6,50	0,83	1,08	1.281
Sulawesi Tenggara	0,83	0,06	6,93	0,72	0,94	906
Gorontalo	1,69	0,11	6,55	1,48	1,91	752
Sulawesi Barat	0,75	0,06	8,12	0,63	0,87	573
Maluku	1,37	0,12	8,87	1,13	1,61	698
Maluku Utara	1,37	0,12	9,14	1,12	1,61	549
Papua Barat	1,65	0,14	8,27	1,38	1,92	523
Papua	0,66	0,09	13,56	0,49	0,84	616

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No.6-8, Jakarta 10710
☎ 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.
3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> ✉
bpshq@bps.go.id

ISBN 978-602-438-277-3

